



Katalog BPS : 9302005.14

**PENDAPATAN REGIONAL RIAU
MENURUT LAPANGAN USAHA
2004 - 2008**



KERJASAMA
BAPPEDA PROVINSI RIAU
DENGAN
BPS PROVINSI RIAU



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU

PENDAPATAN REGIONAL RIAU MENURUT LAPANGAN USAHA 2004 - 2008

ISSN : 0126-4796
Nomor publikasi : 14.551.2007.03
Katalog BPS Provinsi Riau : 9302005.14
Ukuran buku : 21 cm X 28 cm
Jumlah halaman : 54 + ix

Naskah
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh
Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Kerjasama dengan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Riau

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

<http://riau.bps.go.id>



GUBERNUR RIAU

KATA SAMBUTAN

Perencanaan pembangunan sangat terkait dengan berbagai informasi pembangunan. Semakin berkualitas informasi pembangunan tersebut maka semakin berkualitas pula perencanaan pembangunan. Oleh karena informasi pembangunan yang berupa indikator statistik dapat menjadi bahan evaluasi atas pencapaian pembangunan masa lalu sekaligus sebagai bahan dasar penyusunan strategi kebijakan pembangunan di masa datang agar lebih tepat sasaran.

Salah satu informasi statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah adalah statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha yang merupakan informasi atas berbagai sektor ekonomi yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik, konstruksi, perdagangan, transportasi, keuangan, dan jasa-jasa. Dengan tersedianya statistik PDRB menurut Lapangan Usaha ini akan dapat dihasilkan berbagai informasi pembangunan ekonomi mulai dari total nilai perekonomian, laju pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan tingkat pendapatan masyarakat, yang kesemuanya sangat berguna dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Berkaitan dengan itu, saya menghimbau para pemangku kebijakan di Provinsi Riau untuk dapat memanfaatkan informasi statistik ini sesuai dengan kebutuhannya.

Akhirnya kepada semua pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta, saya berharap agar terus partisipasi dalam upaya untuk mewujudkan penyajian indikator statistik ini agar semakin berkualitas di masa yang akan datang.

Pekanbaru, September 2009

GUBERNUR RIAU

Drs. H. WAN ABU BAKAR, MM



PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KATA SAMBUTAN

Informasi statistik daerah yang berkualitas sangat dibutuhkan khususnya oleh para perencana pembangunan dalam rangka untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan daerah dan untuk merencanakan arah pembangunan daerah di masa datang. Harapannya bahwa dengan semakin beragamnya informasi statistik di Provinsi Riau yang dimiliki oleh para perencana pembangunan maka akan membuka wawasan yang lebih luas atas pilihan-pilihan perencanaan dalam mengelola sumber daya yang tersedia di Provinsi Riau.

Kami menyambut baik atas terbitnya publikasi *Pendapatan Regional Riau menurut Lapangan Usaha tahun 2004-2008* yang dapat menggambarkan perkembangan dan corak pembangunan ekonomi Provinsi Riau secara sektoral mulai dari sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri hingga sektor jasa-jasa.

Selain itu, publikasi ini menginformasikan pula tentang perkembangan pendapatan masyarakat dan tingkat inflasi seluruh sektor ekonomi. Kesemua informasi statistik tersebut sangat berguna khususnya bagi para perencana pembangunan ekonomi di daerah. Publikasi ini disusun atas kerjasama Bappeda Provinsi Riau dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau.

Kepada BPS Provinsi Riau beserta jajarannya, yang telah mewujudkan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih, dan berharap untuk terus meningkatkan kualitas penyajian di masa mendatang.

Pekanbaru, September 2009

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI RIAU**
Kepala,

Drs. EMRIZAL PAKIS, MM
Pembina Utama Madya
NIP : 195409141980031007



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU

KATA PENGANTAR

Badan Pusat Statistik (BPS) akan selalu berupaya untuk dapat menyajikan informasi statistik yang berkualitas agar fenomena ekonomi yang terjadi pada tingkat regional dapat direkam dan disusun dalam indikator statistik yang baik. Melalui indikator statistik tersebut akan memudahkan penggambaran atas perkembangan ekonomi dan pergeseran struktur ekonomi yang terjadi.

Oleh karenanya, BPS merasa dibantu untuk secara periodik dapat menyajikan publikasi Pendapatan Regional Riau menurut Lapangan Usaha tahun 2004–2008, yang menyajikan semua sektor ekonomi mulai dari sektor pertanian sampai sektor jasa-jasa, dan merupakan hasil kerjasama antara BPS Provinsi Riau dengan Bappeda Provinsi Riau.

Untuk memudahkan pengguna publikasi ini, disajikan tabel-tabel nominal dan juga tabel-tabel turunannya seperti pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan indeks harga implisit yang mengisyaratkan perkembangan harga masing-masing sektor secara lebih luas. Selain itu, disertakan pula penjelasan konsep, definisi, metodologi dan cara penghitungannya.

Mengingat masih belum sempurnanya publikasi ini, saya mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk perbaikannya, dan sekaligus mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat terbit. Semoga penerbitan publikasi ini dapat bermanfaat bagi para pengguna data.

Pekanbaru, September 2009
Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
K e p a l a ,

IRLAN INDROCAHYO, SE, M.Si
NIP : 340005386

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN GUBERNUR RIAU	i
KATA SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI RIAU	ii
KATA PENGANTAR KEPALA BPS PROVINSI RIAU	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL ANALISIS	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Penjelasan Umum	1
1.2. Kegunaan Statistik Pendapatan Regional	5
1.3. Konsep dan Definisi	6
1.4. Cara Penyajian dan Angka Indeks	6
1.5. PDRB Atas Dasar Harga Konstan	8
BAB II. URAIAN SEKTORAL	10
2.1. Sektor Pertanian	10
2.2. Sektor Pertambangan dan Pengalihan	12
2.3. Sektor Industri Pengolahan	13
2.4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih	15
2.5. Sektor Bangunan	16
2.6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran	16
2.7. Sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi	17
2.8. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	20
2.9. Sektor Jasa-jasa	21
BAB III PERKEMBANGAN PDRB SEKTORAL	23
3.1. PDRB Tanpa Migas	24
3.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	24
3.1.2. Kontribusi Sektoral	29
3.1.3. PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita	31

	Halaman
3.2. PDRB Dengan Migas	32
3.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	32
3.2.2. Kontribusi Sektoral	33
3.2.3. PDRB dan Pendapatan Per Kapita	35
BAB IV PERKEMBANGAN PDRB ANTAR DAERAH	37
PERKEMBANGAN PDRB SE-SUMATERA.....	37
4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	37
4.2. Kontribusi PDRB	37
4.3. PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita	38
LAMPIRAN TABEL-TABEL POKOK	

<http://riau.bps.go.id>

DAFTAR TABEL ANALISIS

Tabel	Halaman
3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Riau Tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan 2000, 2004 - 2008 (%)	28
3.1.2. Distribusi PDRB Riau Tanpa Migas atas Dasar Harga Berlaku, 2004 - 2008 (%) ...	29
3.1.3. PDRB dan Pendapatan Per Kapita Riau Tanpa Migas, 2004 - 2008 (Juta Rp)	31
3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Riau Dengan Migas atas Dasar Harga Konstan 2000, 2004 - 2008 (%)	32
3.2.2. Distribusi PDRB Riau Dengan Migas atas Dasar Harga Berlaku, 2004 - 2008 (%) ..	34
3.2.3. PDRB dan Pendapatan Per Kapita Riau Dengan Migas, 2004 - 2008 (Juta Rp)	36
4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Provinsi se-Sumatera atas Dasar Harga Konstan 2000, 2004 - 2008 (%)	36
4.1.2. Distribusi PDRB Tanpa Migas Provinsi se-Sumatera atas Dasar Harga Berlaku, 2004 - 2008 (%)	37
4.1.3. PDRB Per Kapita Tanpa Migas Provinsi se-Sumatera, 2004 - 2008 (Juta Rp)	40

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
3.1. Pertumbuhan Ekonomi Riau, 2004 - 2008 (%)	25
3.2. Distribusi Persentase PDRB Riau atas Dasar Harga Berlaku, 2008	35

<http://riau.bps.go.id>

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel	Halaman
1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2004-2008 (Juta Rupiah)	41
2. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha, 2004-2008 (Juta Rupiah)	42
3. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Termasuk Migas Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2004-2008	43
4. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Termasuk Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha, 2004-2008	44
5. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2004-2008	45
6. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha, 2004-2008	46
7. Indeks perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2004-2008	47
8. Indeks perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha, 2004-2008	48
9. Indeks berantai Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2004-2008	49
10. Indeks berantai Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha, 2004-2008	50
11. Indeks implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau menurut Lapangan Usaha, 2004-2008	51
12. Pendapatan Regional Termasuk Migas dan Angka Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, 2004-2008	52
13. Pendapatan Regional Termasuk Migas dan Angka Per Kapita Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2004-2008	53
14. Pendapatan Regional Tanpa Migas dan Angka Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, 2004-2008	54
15. Pendapatan Regional Tanpa Migas dan Angka Per Kapita Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2004-2008	55

1

Pendahuluan

<http://www.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENJELASAN UMUM

Tujuan dan cita-cita pembangunan bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejalan dengan hal tersebut, maka prioritas pembangunan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada pertumbuhan (*growth*) saja, melainkan juga perubahan pada tatanan sosial ekonomi masyarakat. Perubahan tatanan sosial ekonomi yang dimaksud seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus, peningkatan kesempatan kerja, dan perubahan pola konsumsi serta distribusi pendapatan.

Perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu, secara langsung atau tidak langsung telah banyak membawa dampak perubahan pada sektor ekonomi, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Peristiwa krisis moneter dan ekonomi di tahun 1997-1998 serta sejak pelaksanaan otonomisasi daerah tahun 1999, telah banyak memberi dampak kepada perubahan dan kemajuan di daerah khususnya Provinsi Riau. Untuk memantau dan mengukur perkembangan ekonomi daerah tersebut, tentu memerlukan beragam informasi

statistik yang akurat dan bermanfaat bagi pembuat keputusan (*decision maker*), baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, sehingga arah pembangunan daerah ke depan dapat diikuti dan dicermati dengan seksama. Oleh karenanya, sejak tahun 2005, BPS Provinsi Riau telah melakukan perubahan tahun dasar, dari semula tahun 1993 menjadi tahun 2000, untuk penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau.

Beberapa alasan untuk melakukan perubahan ke tahun dasar baru karena:

- a) Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar 1993 menjadi makin tidak realistis karena perubahan struktur ekonomi yang relatif cepat. Perkembangan ekonomi nasional, regional, dan lokal dewasa ini makin bergeser ke sektor-sektor yang pertumbuhannya relatif tinggi.
- b) Struktur ekonomi tahun 1993 belum tersentuh dampak deregulasi, debirokratisasi, dan otonomi daerah.
- c) Menurut rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagaimana teruang dalam buku panduan yang baru "Sistem Neraca Nasional", dinyatakan bahwa penghitungan PDB/PDRB atas

dasar harga konstan sebaiknya dimutakhirkan secara periodik dengan menggunakan tahun referensi yang berakhir 0 dan 5. Hal ini juga sudah didukung oleh komitmen para pimpinan BPS se-negara Asean untuk menetapkan tahun 2000 sebagai tahun dasar baru. Sehingga, berbagai alasan diatas mengarah kepada kesimpulan untuk mema-kai tahun dasar 2000 sebagai tahun dasar yang baru.

- d) Karena cakupan terus disempurnakan, dalam jangka waktu tujuh tahun telah terjadi perubahan struktur ekonomi dan ditambah dengan berbagai jenis komoditas baru serta kombinasi harga yang sangat signifikan. Per-baik-an cakupan terutama di sektor pertanian. Perubahan proses komoditas umumnya terjadi di sektor industri pengolahan (elektronik/teknologi informatika). Di sisi lain juga terjadi perubahan dalam komposisi harga antara sektor primer, sekunder, dan tersier.
- e) Perkembangan ekonomi dunia dalam kurun waktu 1993-2000 yang diwarnai oleh globalisasi tentunya juga akan berpengaruh kepada perekonomian domestik. Masih dalam periode tersebut, pada pertengahan tahun 1997 hadirnya krisis ekonomi juga berdampak kepada perubahan struktur perekonomian

Indonesia. Secara ringkas, bisa dinyatakan bahwa struktur ekonomi tahun 2000 telah sangat berbeda dengan tahun 1993.

Dengan perekonomian Provinsi Riau yang terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, telah membawa dampak positif atas perkembangan kebutuhan barang dan jasa dan juga perkembangan ekonomi kewilayahan yang turut mengalami perubahan struktur ekonomi. Beberapa kegiatan ekonomi yang baru, banyak bermunculan disamping, komoditas yang lama tetapi dengan teknologi baru, seperti budidaya burung walet, produk telepon seluler, TV layar datar, dan sebagainya. Dengan demikian, angka penghitungan PDRB Riau dengan tahun dasar baru ini menjadi penting agar bisa menyajikan perkembangan ekonomi terkini dan lebih cermat.

Disamping itu, era otonomi daerah telah banyak memberikan perubahan bagi setiap komponen lembaga Pemerintah Daerah untuk melakukan secara mandiri penataan manajemen pembangunan secara lebih terarah dan terpadu sesuai dengan ciri khas masing-masing daerah. Berbagai tingkat kinerja aktivitas pembangunan daerah di Provinsi Riau, baik yang telah maupun yang sedang dilaksanakan, disepakati untuk dapat terus dipantau dan dievaluasi dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Riau 2020.

Untuk mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Riau tersebut salah satu kebutuhan informasi yang diperlukan adalah tentang informasi statistik, khususnya informasi perekonomian makro Provinsi Riau. Untuk keperluan itu, BPS Provinsi Riau telah berupaya melakukan penghitungan PDRB secara berkala. Melalui informasi PDRB ini, diharapkan dapat diketahui kondisi ekonomi makro Provinsi Riau, karena pada dasarnya PDRB merupakan realisasi jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di provinsi ini atas potensi sumber daya yang tersedia.

Penyajian angka PDRB biasanya dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang konstan pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (*base year*) yakni tahun 2000.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Penyusunan publikasi *Pendapatan Regional Riau menurut Lapangan Usaha, 2004-2008*, tetap mengacu kepada konsep, definisi, metodologi, cakupan, dan sumber data secara nasional. Beberapa alasan yang melatarbelakanginya adalah untuk menjaga kelayakan dan konsistensi hasil penghitungan baik antarprovinsi maupun dengan nasional.

Untuk menghitung angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha, yaitu:

1. Pertanian, Perternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas, dan Air
5. Bangunan/Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran.
7. Angkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Sewa Bangunan, dan Jasa Perusahaan.
9. Jasa-jasa.

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semua komponen tersebut dijumlahkan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak tak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yaitu:

1. Pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung;
2. Pengeluaran konsumsi pemerintah;
3. Pembentukan modal tetap domestik bruto;
4. Perubahan stok; dan
5. Ekspor neto yang dihitung dari ekspor dikurangi impor.

Dari ketiga pendekatan penghitungan tersebut, secara konsep seyogyanya jumlah pengeluaran tadi harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan

untuk faktor-faktor produksinya. PDRB yang telah diuraikan di atas disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena mencakup komponen pajak tidak langsung neto.

Pada publikasi ini angka PDRB yang di-tampilkan adalah PDRB yang memakai pendekatan produksi. Di samping itu, beberapa indikator ekonomi penting lainnya dari angka PDRB dapat pula diturunkan, seperti:

1. Produk Regional Bruto, yaitu PDRB

ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk suatu wilayah yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di suatu wilayah.

2. Produk Regional Neto atas dasar harga pasar, yaitu PDRB dikurangi dengan

seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama satu tahun.

3. Produk Regional Neto atas dasar biaya faktor produksi, yaitu Produk Regional

Neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan Pajak Tidak Langsung Neto. Pajak ini merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah.

Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tidak langsung bersifat menaikan harga jual sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, Produk Regional atas dasar harga faktor produksi disebut sebagai Pendapatan Regional.

4. Angka-angka per Kapita, merupakan ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PENDAPATAN REGIONAL

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah.

1. Angka Nominal PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula, dan begitu juga sebaliknya.

2. PDRN atas dasar harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu wilayah.

3. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

4. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peran setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

5. PDRB atas dasar harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar wilayah/negeri (yang dipublikasikan pada penerbitan lain).

6. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peran lembaga dalam penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi (yang dipublikasikan pada penerbitan lain).

7. PDRB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar wilayah/negeri (yang dipublikasikan pada penerbitan lain).

8. PDRB dan PDRN atas dasar biaya faktor produksi per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan

PDRN setiap kepala atau per satu orang penduduk.

9. PDRB dan PDRN atas dasar biaya faktor produksi per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

1.3 KONSEP DAN DEFINISI

Berikut ini dijelaskan istilah yang berhubungan dengan PDRB antara lain: output, biaya antara dan nilai tambah bruto. Kejelasan pengertian dari tiga istilah tersebut sangat penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan PDRB. Selain hal tersebut, pada bab ini juga dijelaskan mengenai pendekatan penghitungan PDRB.

1.3.1 OUTPUT

Output adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Pada dasarnya nilai output diperoleh dari hasil perkalian antara kuantum produksi dan harganya.

1.3.2 BIAYA ANTARA

Biaya antara terdiri dari biaya yang dipakai habis untuk proses produksi (*intermediate input*). Biaya-biaya ini merupakan biaya untuk barang tidak tahan lama dan jasa yang habis digunakan di dalam proses produksi oleh unit-unit produksi domestik

dalam rentang waktu tertentu biasanya satu tahun.

1.3.3 NILAI TAMBAH BRUTO

Nilai Tambah Bruto merupakan selisih antara output dengan biaya antaranya atau apabila dirumuskan menjadi: Nilai Tambah Bruto = Output - Biaya Antara. Pengertian konsep nilai tambah bruto sangat penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan PDRB, yang tidak lain merupakan penjumlahan seluruh besaran nilai tambah bruto dari seluruh unit produksi pada wilayah tertentu dan dalam rentang waktu tertentu.

1.4 CARA PENYAJIAN DAN ANGKA INDEKS

PDRB, seperti yang telah diuraikan, secara berkala dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar tertentu. Kedua bentuk penyajian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada penyajian atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran produk domestik regional bruto.

b. Pada penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar, dan dalam publikasi ini harga konstan didasarkan kepada harga pada tahun 2000. Karena menggunakan harga tetap, perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata di sebabkan oleh perkembangan riil dari kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga.

PDRB juga disajikan dalam bentuk peranan sektoral dan angka-angka indeks, yaitu: indeks perkembangan; indeks berantai; dan indeks harga implisit yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- **Peran Sektoral** diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB masing-masing sektor dengan nilai total seluruh sektor PDRB dikalikan 100 pada tahun yang bersangkutan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000. Dalam penyajiannya, peranan sektor diberi judul tabel: Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto.
- **Indeks Perkembangan** diperoleh dengan membagi nilai PDRB pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar, dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat dari tahun ke tahun terhadap tahun dasar.

- **Indeks Berantai** diperoleh dengan membagi nilai PDRB pada masing-masing tahun dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Apabila angka ini dikali dengan 100 dan hasilnya dikurangi 100, maka angka ini menunjukkan tingkat atau laju pertumbuhan agregat produksi untuk masing-masing tahun. Metode penghitungan ini dapat pula digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan sektoral.
- **Indeks Harga Implisit** diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan untuk masing-masing tahun yang sama dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar. Selanjutnya bila dari indeks harga implisit ini dihitung indeks berantainya dengan rumus indeks berantai, akan terlihat tingkat perkembangan harga setiap tahun terhadap tahun sebelumnya. Indeks ini secara berkala juga dapat menunjukkan besaran inflasi yang mencakup seluruh barang dan jasa yang diproduksi di wilayah penghitungan PDRB.

1.5 PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN

Pendapatan regional atas dasar harga konstan 2000 sangat penting untuk melihat

perkembangan riil dari tahun ke tahun bagi setiap agregat ekonomi yang diamati. Agregat yang dimaksud tersebut dapat merupakan PDRB secara keseluruhan, nilai tambah sektoral (PDRB sektoral) ataupun komponen penggunaan PDRB. Pada dasarnya dikenal empat cara untuk memperoleh nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan. Masing-masing cara tersebut diuraikan berikut ini.

1.5.1 Revaluasi

Dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar 2000, dan hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar harga konstan 2000. Selanjutnya, nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil penghitungan di atas.

Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya yang digunakan karena mencakup komponen yang terlalu banyak, disamping data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan 2000 biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan 2000 masing-masing tahun dengan ratio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

1.5.2 Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan atau indeks dari berbagai indikator produksi, seperti: Jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang dihitung. Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap penghitungan output atas dasar harga konstan, kemudian dengan menggunakan ratio tetap nilai tambah atas dasar harga konstan yang sama. Ratio tersebut diperoleh dari survei khusus (SKPR) dan Tabel Input-Output Riau 2001.

1.5.3 Deflasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahun dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB).

1.5.4 Deflasi Berganda

Dalam metode deflasi berganda ini yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya; selanjutnya nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya

antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan Indeks Harga Produksi atau Indeks Harga Perdagangan Besar sesuai dengan cakupan komoditasnya

Pada kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, disamping karena komponennya terlalu banyak juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan 2000, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.

<http://riau.bps.go.id>

2

Uraian Sektoral

<http://www.bps.go.id>

BAB II

URAIAN SEKTORAL

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang ruang lingkup dan definisi dari masing-masing sektor dan subsektor, cara-cara penghitungan nilai tambah, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, serta sumber data yang digunakan.

2.1 SEKTOR PERTANIAN

2.1.1 Ruang Lingkup

Sektor pertanian mencakup segala perusahaan yang didapat dari alam dan merupakan benda atau barang biologis (hidup). Termasuk dalam kegiatan ini:

Subsektor Tanaman Bahan Makanan

Yaitu meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela rambat, ketela pohon, umbi-umbian, kacang tanah, kacang kedelai, kacang-kacangan lainnya, sayur-sayuran, buah-buahan, padi-padian dan tanaman bahan makanan lainnya.

Subsektor Tanaman Perkebunan

Yaitu meliputi semua jenis kegiatan tanaman perkebunan, baik yang diusahakan

rakyat maupun yang diusahakan perusahaan perkebunan. Adapun komoditas yang dihasilkan seperti: cengkeh, jahe, jambu mete, jarak, kakao, karet, kapas, kapok, kayu manis, kelapa, kelapa sawit, kemiri, kina, kopi, lada, pala, panili, serat karung, tebu, tembakau, teh, serta tanaman perkebunan lainnya.

Subsektor Peternakan

Yaitu meliputi semua kegiatan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasil-hasilnya, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Komoditas hasil peternakan antara lain: sapi, kerbau, kambing, babi, ayam, itik, telur ayam, telur itik, susu sapi, sarang burung walet serta hewan peliharaan lainnya.

Subsektor Kehutanan

Yaitu meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran. Termasuk juga kegiatan perburuan. Komoditas hasil kehutanan di antaranya adalah kayu gelondongan, baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya, kayu bakar, rotan, arang, bambu, kopal, menjangan, babi

hutan, dan hasil hutan lainnya seperti madu lebah hutan, sarang burung walet hutan.

Subsektor Perikanan

Yaitu meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar maupun di air asin. Komoditas perikanan antara lain seperti ikan tuna dan jenis ikan laut lainnya, ikan mas dan jenis ikan darat lainnya, ikan bandeng dan jenis ikan air payau lainnya, udang dan binatang berkulit keras lainnya, cumi-cumi dan binatang lunak lainnya, rumput laut serta tumbuhan laut lainnya.

2.1.2 Metode Estimasi

Pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan dari sudut produksi. Secara umum, nilai output diperoleh dari hasil perkalian antara seluruh produksi yang dihasilkan terhadap harga produsennya.

NTB suatu subsektor diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap komoditas. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas dasar harga produsen terhadap seluruh biaya antara, yang dalam prakteknya biasa juga dihitung melalui perkalian antara rasio NTB terhadap output komoditas tertentu. Untuk keperluan penyajian data NTB atas dasar harga konstan 2000, digunakan metode revaluasi, yaitu suatu metode yang menilai seluruh faktor produksi dan

biaya-biaya antara berdasarkan harga tahun 2000.

Khusus untuk subsektor peternakan, penghitungan produksi tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus diperoleh melalui suatu rumus persamaan yang menggunakan tiga peubah, yakni: banyaknya ternak yang dipotong ditambah selisih populasi ternak dan selisih antara ekspor dan impor ternak.

2.1.3 Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk penyusunan output dan NTB sektor pertanian adalah data produksi, harga, dan rasio NTB.

Data produksi Tanaman Bahan Makanan bersumber dari BPS dan Dinas Tanaman Pangan, data perkebunan dari Dinas Perkebunan, data peternakan dari BPS dan Dinas Peternakan, data kehutanan dari Dinas Kehutanan, dan data perikanan bersumber dari Dinas Perikanan dan Kelautan.

Data harga untuk tiap-tiap komoditas selain bersumber dari BPS Provinsi Riau, juga diperoleh dari dinas-dinas terkait.

Rasio NTB terhadap output didasarkan pada hasil yang disajikan dalam Publikasi Tabel Input-Output Provinsi Riau 2001.

2.2 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Sektor ini mencakup kegiatan penggalian, pengeboran, penyaringan, pencucian, pemilihan dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam, baik berupa benda padat, benda cair maupun gas, yang dilakukan di bawah tanah maupun di atas permukaan bumi. Sifat dan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menciptakan nilai guna dari barang tambang dan galian sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan, dijual atau diproses lebih lanjut. Kegiatan lain yang termasuk dalam sektor ini adalah pembuatan garam kasar dengan cara menguapkan air laut.

2.2.1 Ruang Lingkup

Seluruh jenis komoditas yang dicakup dikelompokkan ke dalam tiga subsektor, yaitu: pertambangan migas, pertambangan tanpa migas dan penggalian.

Subsektor Minyak dan Gas Bumi

Meliputi kegiatan pencarian kandungan minyak dan gas bumi, penyiapan pengeboran, penambangan, penguapan, pemisahan serta penampungan untuk dapat dijual atau dipasarkan. Kegiatan ini menghasilkan minyak bumi, kondensat dan gas bumi. Pada penghitungan seris 2000,

cakupan komoditas subsektor ini bertambah dengan adanya uap panas bumi.

Subsektor Pertambangan Non Migas

Meliputi pengambilan dan persiapan pengolahan lanjutan benda padat, baik di bawah maupun di atas permukaan bumi serta seluruh kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memanfaatkan bijih logam dan hasil tambang lainnya. Hasil kegiatan ini berwujud batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, fero nikel, nikel mattes, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas dan perak, bijih mangan, belerang, yodium, fosfat, aspal alam, serta komoditas lainnya.

Subsektor Penggalian

Mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian yang umumnya berada di permukaan bumi. Hasil kegiatan ini berupa batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, koalin, tanah liat dan sebagainya.

2.2.2 Metode Estimasi

Untuk memperoleh estimasi output dan nilai tambah atas dasar harga berlaku, dilakukan perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan

mengalikan output tersebut dengan rasio NTB terhadap output di masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan metode revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan di masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2000. Lalu, melalui perkalian antara output tersebut dengan rasio NTB terhadap output tahun 2000 diperoleh NTB atas dasar harga konstan 2000.

2.2.3 Sumber Data

Data yang diperlukan untuk penghitungan sektor ini adalah data produksi diperoleh dari BPS, perusahaan pertambangan/penggalian dan Dinas Pertambangan. Data harga diperoleh dari BPS dan perusahaan penggalian. Rasio NTB terhadap output diperoleh dari Publikasi Tabel Input-Output Indonesia 2000 dan Tabel Input-Output Provinsi Riau 2001.

2.3 SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Kegiatan sektor industri pengolahan mencakup 3 (tiga) subsektor yaitu:

- a) Industri pengilangan minyak bumi,
- b) Industri pengolahan non-migas, dan
- c) Industri pengilangan gas alam cair (LNG)

Untuk industri non-migas dirinci lagi menjadi industri non-migas besar/sedang,

non-migas kecil, dan kerajinan rumah tangga.

2.3.1 Ruang Lingkup

Industri Pengilangan Minyak Bumi

Penyajian subsektor ini tidak berbeda sama sekali antara seri lama dengan seri baru.

Industri Non-migas Besar/Sedang

Dalam penghitungan seri baru ini (2000=100) dengan seri lama (1993=100) tetap mengacu kepada pembagian kelompok subsektor Industri Besar Sedang (IBS) pada KLUI 2 dijit yakni menjadi 9 (sembilan) kelompok, seperti:

31. Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;
32. Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit;
33. Industri Kayu, Bambu, Rotan dan Perabot Rumahtangga;
34. Industri Kertas dan Barang-barang dari Kertas, Percetakan dan Penerbitan;
35. Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia, Minyak Bumi, Batu Bara, Karet dan Plastik;
36. Industri Barang-barang Galian Bukan Logam, kecuali Minyak Bumi dan Batu Bara.
37. Industri Logam Dasar.
38. Industri Barang dari Logam, Mesin dan Peralatannya.
39. Industri Pengolahan lainnya.

Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga

Subsektor ini sama dengan cakupan dan definisi kegiatan Industri Besar/Sedang Non-migas. Perbedaannya terletak pada jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan industri tersebut. Perusahaan dikatakan sebagai Industri Kecil jika jumlah tenaga kerjanya antara 5 sampai 19 orang, sedangkan Industri Kerajinan Rumah Tangga jika jumlah tenaga kerjanya kurang dari 5 orang.

Menurut kegiatan utama yang dihasilkan, kegiatan subsektor IKKR dikelompokkan menjadi sembilan kelompok komoditas, yaitu:

31. Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;
32. Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit;
33. Industri Kayu, Bambu, Rotan dan Perabot Rumah tangga;
34. Industri Kertas dan Barang-barang dari Kertas, Percetakan dan Penerbitan;
35. Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia, Minyak Bumi, Batu Bara, Karet dan Plastik;
36. Industri Barang-barang Galian Bukan Logam, kecuali Minyak Bumi dan Batu Bara.
37. Industri Logam Dasar.
38. Industri Barang dari Logam, Mesin dan Peralatannya.
39. Industri Pengolahan lainnya.

Industri Pengilangan Gas Alam Cair (LNG)

Penyajian subsektor ini tidak berbeda sama sekali antara seri lama dengan seri baru, karena disamping komoditasnya tunggal (LNG), produknya juga hanya ada di beberapa tempat yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Kalimantan Timur.

2.3.2 Metode Estimasi

Dalam penghitungan subsektor industri pengolahan non-migas besar/sedang digunakan pendekatan produksi, yaitu output dihitung lebih dahulu. Kemudian, output dikurangi dengan biaya antara menghasilkan nilai tambah bruto. Untuk mendapatkan NTB atas dasar harga konstan dipakai metode deflasi dimana output dan jumlah tenaga kerja digunakan sebagai deflator.

Untuk penghitungan subsektor pengilangan minyak menggunakan pendekatan produksi seperti halnya industri pengolahan non migas, sedangkan untuk harga konstan digunakan cara revaluasi.

Sedangkan untuk subsektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga penghitungan output dan NTB-nya menggunakan pendekatan tenaga kerja, yang dihitung secara rinci menurut kegiatan industri yang dikelompokkan dalam 3 digit KLUI. Untuk menghitung NTB atas dasar harga konstan

menggunakan metode deflasi, dan sebagai deflatornya adalah jumlah output dan tenaga kerja.

2.3.3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penghitungan sektor ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu:

1. Tabel Input-Output Indonesia (BPS)
2. Publikasi Tahunan Statistik Industri Besar/Sedang (BPS)
4. Publikasi Indikator Ekonomi (BPS)
5. Publikasi Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia (BPS)
6. Publikasi Tahunan Pertambangan dan Energi, Deptamben.
7. Publikasi Tahunan Statistik Pertambangan Minyak & Gas Bumi (BPS)

2.4 SEKTOR LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

2.4.1 Ruang Lingkup

Subsektor Listrik

Kegiatan ini mencakup pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik, baik yang diselenggarakan oleh PT. PLN (Persero) maupun oleh perusahaan Non-PLN, dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau yang diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan listrik yang dicuri.

Subsektor Air Bersih

Kegiatan subsektor air minum mencakup proses pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air minum, serta pendistribusian dan penyalurannya secara langsung melalui pipa dan alat lain ke rumah tangga, instansi pemerintah dan swasta. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh Perusahaan Air Minum (PAM) maupun bukan PAM.

2.4.2 Metode Estimasi

Metode penghitungan subsektor listrik menggunakan pendekatan produksi. Output dan NTB subsektor ini diperoleh dari penjumlahan output/NTB dari PLN dan Non-PLN.

Untuk penghitungan subsektor air bersih menggunakan pendekatan produksi, dimana output dan NTB atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan metode revaluasi.

2.4.3 Sumber Data

Data produksi, harga dan biaya antara subsektor listrik untuk PLN diperoleh dari PT. PLN (Persero) Wilayah Riau, sedangkan untuk perusahaan listrik Non-PLN dari Dinas Pertambangan, data sekunder dan SKPR.

Data produksi, harga dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan air

minum diperoleh dari hasil survei tahunan Perusahaan Air Minum.

2.5 SEKTOR BANGUNAN

2.5.1 Ruang Lingkup

Pada umumnya kegiatan sektor ini terdiri atas bermacam kegiatan yang meliputi: pembuatan, pembangunan, pemasangan, dan perbaikan berat maupun ringan semua jenis konstruksi yang keseluruhan kegiatan tersebut dapat dirinci menurut standar KLUI.

Sektor bangunan terbagi 5 bagian yaitu: Bangunan Tempat Tinggal dan Bangunan Bukan Tempat Tinggal, Prasarana Pertanian, Jalan-Jembatan-Pelabuhan, Bangunan Instalasi Listrik-Gas-Air Minum dan Komunikasi, serta bangunan lainnya.

2.5.2 Metode Estimasi

Metode penghitungan sektor bangunan menggunakan pendekatan pendapatan untuk NTB atas dasar harga berlaku, dan metode deflasi untuk penghitungan atas dasar harga konstan.

2.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan didapat dari hasil SUSENAS Riau, Publikasi AKI dan Publikasi Non-AKI, serta Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia.

2.6 SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

2.6.1 Ruang Lingkup

Subsektor Perdagangan

Kegiatan yang dicakup dalam subsektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun bekas, untuk tujuan penyaluran/pendistribusian tanpa merubah sifat barang tersebut. Dalam penghitungannya kegiatan ini dikelompokkan ke dalam dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar mencakup kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importir ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan, dan lembaga yang tidak mencari untung. Sedangkan perdagangan eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga tanpa merubah sifat, baik barang baru atau barang bekas.

Subsektor Hotel

Subsektor ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi di sini adalah hotel berbintang maupun tidak, serta tempat tinggal lainnya yang di-

gunakan untuk menginap seperti losmen, motel dan sebagainya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman, serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap di mana kegiatan-kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan yang datanya sulit dipisahkan.

Subsektor Restoran

Kegiatan subsektor restoran mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam subsektor ini seperti rumah makan, warung sate, warung kopi, catering, dan kantin.

2.6.2 Metode Estimasi

Penghitungan nilai tambah sub sektor perdagangan menggunakan metode arus barang (*commodity flow*), sedangkan untuk sub sektor hotel menggunakan metode estimasi dengan pendekatan produksi. Dan untuk sub sektor restoran menggunakan pendekatan pengeluaran konsumsi makanan dan minuman jadi di luar rumah.

Untuk penghitungan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan untuk sektor ini dihitung masing-masing dengan metode revaluasi dan atau deflasi.

2.6.3 Sumber Data

1. Publikasi Susenas dan pola konsumsi Provinsi Riau.
2. Publikasi Direktori Hotel Riau.
3. Publikasi tingkat penghunian kamar malam hotel Riau.
4. Buletin Ekonomi BPS.
5. Data sekunder dan SKPR.

2.7 SEKTOR PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

2.7.1 Ruang Lingkup

Subsektor Pengangkutan

Kegiatan yang dicakup dalam subsektor pengangkutan terdiri dari atas Jasa Angkutan Jalan Raya, Angkutan Laut, Angkutan Udara, dan Jasa Penunjang Angkutan. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal, pelabuhan, dan pergudangan.

Angkutan Jalan Raya meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk di sini kegiatan lainnya seperti carter/sewa kendaraan baik dengan

atau tanpa pengemudi. Tidak termasuk kegiatan lainnya yang diusahakan sebagai satu satuan usaha dengan kegiatan ini seperti jasa bongkar muat, keagenan barang dan penumpang, perbaikan dan pemeliharaan.

Angkutan Laut meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu satuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya, dan disamping itu data yang tersedia juga sulit untuk dipisahkan. Misalnya tangker-tangker yang diusahakan oleh Pertamina untuk angkutan di dalam negeri, kapal milik perusahaan penangkapan ikan dan angkutan khusus lainnya.

Angkutan Udara meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di daerah tersebut. Termasuk disini kegiatan lainnya yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang datanya sulit untuk dipisahkan, seperti EMKU (Ekspedisi Muatan Kapal Udara) dan lain-lain, baik untuk angkutan penerbangan dalam negeri maupun angkutan penerbangan luar negeri. Tidak termasuk kegiatan penerbangan yang

dilakukan oleh instansi/perkumpulan yang sifatnya tidak terbuka untuk umum.

Jasa Penunjang Angkutan mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat, terminal dan parkir, bongkar muat laut dan darat, keagenan penumpang, ekspedisi laut, jalan tol, dan jasa penunjang lainnya seperti pengerukan dan pengujian kelayakan angkutan laut.

Subsektor Komunikasi

Subsektor ini terdiri dari kegiatan pos dan giro, telekomunikasi, dan jasa penunjang komunikasi. Pos dan giro mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman surat, wesel dan paket pos yang diusahakan oleh Perum Pos dan Giro. Telekomunikasi meliputi kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman berita melalui telegram, telepon, faksimile, dan telex yang diusahakan oleh antara lain PT Telekomunikasi, PT Excelcomindo, dan PT Indosat. Jasa penunjang komunikasi meliputi kegiatan lainnya yang menunjang kegiatan komunikasi seperti warung telekomunikasi (wartel), warung internet (warnet), dan telepon seluler (ponsel).

2.7.2 Metode Estimasi

Nilai tambah subsektor angkutan jalan raya atas dasar harga berlaku dengan menggunakan pendekatan produksi yang didasarkan pada data jumlah armada angkutan umum barang dan penumpang wajib uji yang diperoleh dari laporan tahunan Dinas Perhubungan, dan hasil SKPR sektor angkutan, serta data sekunder kecamatan.

Penghitungan nilai tambah subsektor angkutan laut dilakukan melalui pendekatan alokasi dari angka nasional subsektor angkutan laut, karena kegiatan angkutan laut merupakan kegiatan multiregional, di mana kegiatannya bisa sekaligus merupakan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal yang diusahakan oleh perusahaan milik nasional, baik yang melakukan trayek dalam negeri maupun internasional.

Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi dengan menggunakan indeks angkutan/transpor. Kemudian, nilai tambah atas dasar harga berlaku subsektor angkutan udara diperoleh dari laporan tahunan tiap bandar udara. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan cara deflasi.

Nilai tambah subsektor jasa penumpang angkutan seperti terminal, parkir, keagenan barang dan penumpang, ekspedisi,

bongkar-muat, pergudangan diperoleh dari SKPR. Sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode deflasi.

Subsektor komunikasi mencakup jasa pos dan giro, serta telekomunikasi. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga berlaku didasarkan pada data produksi dan struktur biaya yang diperoleh dari laporan keuangan PT. POSINDO. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 memakai metode ekstrapolasi dengan menggunakan indeks gabungan dari jumlah surat yang dikirim.

Penghitungan nilai tambah subsektor telekomunikasi atas dasar harga berlaku berdasarkan data yang bersumber dari laporan keuangan Kantor Wilayah Usaha Telekomunikasi Riau. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan indeks produksi gabungan tertimbang yang meliputi jumlah menit percakapan lokal/interlokal.

2.7.3 Sumber Data

1. Dinas Perhubungan Riau.
2. Data SKPR.
3. Data Sekunder.
4. Kandatel Riau Daratan.

2.8 SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN

Sektor bank dan lembaga keuangan lainnya disebut sebagai sektor finansial, karena secara umum kegiatan utamanya berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan berupa penarikan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. Secara garis besar sektor ini terbagi atas 3 kelompok kegiatan utama yaitu: usaha perbankan dan moneter (otoritas moneter), lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, serta usaha persewaan bangunan dan tanah. Namun, dalam klasifikasi tahun dasar 2000 sektor bank dan lembaga keuangan lainnya berubah menjadi Sektor Keuangan, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan.

2.8.1 Ruang Lingkup

Subsektor bank, meliputi Bank Indonesia (BI) dan bank non BI (bank umum pemerintah dan bank umum swasta) dan BPR. Subsektor lembaga keuangan bukan bank mencakup kegiatan asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi sosial, asuransi kerugian dan asuransi lainnya, mencakup juga koperasi, KUD dan Non KUD, pegadaian dan dana pensiun. Kemudian, subsektor jasa penunjang keuangan mencakup pedagang valuta asing, pasar modal dan sebagainya.

2.8.2 Metode Estimasi

Penghitungan nilai tambah subsektor bank atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia. Kemudian nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara deflasi dengan menggunakan IHK Umum.

Penghitungan nilai tambah asuransi atas dasar harga berlaku diperoleh melalui SKPR dan data sekunder. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara metode deflasi, juga dengan menggunakan IHK Umum.

Penghitungan nilai tambah Koperasi berasal dari data SKPR. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi, dan deflatornya adalah IHK Umum.

Nilai tambah subsektor sewa bangunan baik untuk tempat tinggal dan bukan, diperoleh dari selisih antara output dengan biaya antaranya. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode deflasi, sebagai deflatornya adalah IHK Umum.

Selain subsektor tersebut, subsektor jasa penunjang keuangan, seperti pedagang valas, dihitung dengan cara yang sama seperti subsektor asuransi maupun koperasi.

2.8.3 Sumber Data

1. Publikasi/Laporan Tahunan BI
2. Publikasi IHK
3. Data Sekunder dan SKPR

2.9 JASA - JASA

Sektor ini mencakup subsektor jasa pemerintahan umum dan subsektor jasa swasta. Subsektor pemerintah umum meliputi pemerintahan dan hankam, sedangkan subsektor jasa swasta meliputi subsektor jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan kebudayaan, jasa perorangan dan rumah tangga.

2.9.1 Ruang Lingkup

Subsektor jasa sosial dan kemasyarakatan mencakup jasa pendidikan yang dikelola oleh swasta meliputi TK, SD, SLTP, SLTA dan Universitas/Akademi. Juga termasuk jasa pendidikan keterampilan berbentuk kursus. Jasa kesehatan oleh swasta seperti: rumah sakit, rumah bersalin, dokter dan sebagainya. Kemudian jasa kemasyarakatan lainnya seperti panti asuhan dan panti jompo. Terakhir jasa lainnya, adalah jasa yang tidak termasuk dalam cakupan di atas namun masih tergolong dalam sub-sektor jasa sosial dan kemasyarakatan.

Subsektor jasa hiburan mencakup kegiatan bioskop, panggung kesenian, radio swasta, taman hiburan, dan sebagainya.

Subsektor jasa perorangan dan rumah tangga mencakup kegiatan perbengkelan (mobil, motor, sepeda, alat-alat elektronik), dan jasa perorangan (tukang binatu, salon, tukang semir, tukang jahit dan sebagainya).

2.9.2 Metode Estimasi

Nilai tambah subsektor pemerintahan dan hankam terdiri dari upah dan gaji rutin pegawai pemerintah pusat dan daerah. Upah dan gaji yang dihitung mencakup upah dan gaji dari belanja rutin dan sebagian dari belanja pembangunan.

Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks jumlah pegawai negeri. Penghitungan nilai tambah subsektor jasa sosial dan kemasyarakatan atas dasar harga berlaku melalui pendekatan produksi, sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan cara/metode ekstrapolasi.

Penghitungan nilai tambah subsektor jasa hiburan dan kebudayaan atas dasar harga berlaku juga melalui pendekatan produksi. Sedangkan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan cara deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK aneka dan jasa. Kemudian untuk penghitungan nilai tambah atas dasar harga berlaku subsektor jasa perorangan dan rumah tangga juga melalui pendekatan produksi, sekaligus penghitung-

an nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode deflasi.. Sebagai deflatornya adalah IHK aneka dan jasa.

2.9.3 Sumber Data

1. Data belanja pegawai pusat dan ABRI dari BPS.

2. Data belanja Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dari BPS.
3. Data sekunder dan SKPR.
4. Data Podes SP/ST/SE.
5. Publikasi IHK

<http://riau.bps.go.id>

3

Perkembangan PDRB

Sektoral

BAB III

PERKEMBANGAN PDRB RIAU

Peran ekonomi migas pada tingkat nasional memang telah berkurang sehingga berpengaruh meningkatnya peran industri dan pertanian. Secara nasional migas sangat berperan dalam perekonomian, begitu juga terhadap perekonomian provinsi khususnya provinsi-provinsi khususnya penghasil migas.

Pengaruh kenaikan harga minyak dunia memaksa pemerintah melakukan kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri seperti terjadi pada akhir tahun 2005. Selama tahun 2006, dampak kenaikan BBM masih mempengaruhi setiap aktivitas ekonomi nasional. Situasi perekonomian mulai terkendali di saat tahun 2007, pengaruh dari dampak kenaikan BBM pada tahun 2005 sudah mulai sirna seiring dengan penyesuaian keseimbangan proses produksi dari setiap aktivitas ekonomi yang secara simultan telah mampu menyesuaikan dan menyeimbangkan biaya produksi dengan tingkat produksi sehingga kondisi perekonomian mulai berkembang semakin kondusif.

Secara nasional selama tahun 2008 telah terjadi beberapa peristiwa yang diperkirakan dapat mengganggu aktivitas roda perekonomian. Pertama, kembali terjadi kenaikan harga minyak dipasaran dunia yang

mulai terasa dari awal tahun 2008 . Kenaikan harga minyak yang kedua dalam kurun waktu 2004-2008 ini juga kembali memaksa pihak pemerintah melakukan kebijakan kompensasi harga BBM. Seiring dengan itu terjadi juga percepatan kenaikan harga sawit bermula pada akhir tahun 2007 hingga puncak harga sempat menembus di atas 1.600 rupiah per kilonya. Selanjutnya peristiwa kedua adalah terjadinya krisis global pada akhir triwulan tiga tahun 2008 yang diiringi pula oleh mulai anjloknya harga sawit hingga menyentuh titik terendah berkisar 250 rupiah per kilogramnya.

Berbekal pengalaman sebelumnya pemerintah dengan sigap bersama seluruh komponen yang terlibat dalam perekonomian bersinergi secara simultan menyikapi peristiwa tersebut. Hasilnya cukup menggembirakan semua pihak karena perkembangan ekonomi masih bertahan dan berjalan cukup baik ditandai dengan tingkat laju pertumbuhan ekonominya.

Laju pertumbuhan ekonomi yang dapat bertahan baik tersebut karena didukung oleh kondisi makro ekonomi lainnya. Inflasi tahunan tahun 2008 hanya satu digit yakni 9,02 persen dan saat tahun 2005 sempat menembus dua digit yakni 17,10 persen, BI Rate tertinggi terjadi pada akhir tahun 2005 sebesar 12,75 persen terus

terkendali mengalami penurunan menjadi 9,25 persen pada akhir tahun 2008 dan kecenderungan terus mengecil.

Dampak makro ekonomi yang dirasakan oleh masing-masing provinsi di Indonesia berbeda-beda. Selama tahun 2008, sebagian besar provinsi mampu mengatasi dampak kenaikan BBM, namun ada beberapa provinsi masih terkena imbas kenaikan BBM tersebut.

Sementara itu pasca kenaikan harga BBM pada tahun 2005, perkembangan ekonomi Provinsi Riau mulai tahun 2006 hingga tahun 2007 senantiasa mengalami kemajuan yang cukup berarti. Ketangguhan daya beli masyarakat Riau yang dominan kokoh terutama bersumber dari subsektor perkebunan turut serta membantu roda perekonomian di Riau sehingga dapat bertahan dan dengan cepat menyesuaikan kondisi ekonomi yang terjadi. Ini tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa migas Riau pada tahun 2006 hingga tahun 2008 yang senantiasa berada di atas 8 persen sama seperti tingkat pertumbuhan selama tahun 2005.

Secara umum perekonomian Riau tanpa migas selama tahun 2008 ditandai dengan tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan tanpa migas, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor bangunan, sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan tanpa migas.

Pada sisi perekonomian migas, subsektor minyak dan gas mengalami fluktuasi tingkat pertumbuhan yang merupakan imbas dari gejolak harga minyak dunia. Tingkat pertumbuhannya berkaitan erat dengan ketidakstabilan tingkat produksi yang terjadi. Kemudian efeknya akan sangat mempengaruhi pembentukan PDRB. Secara keseluruhan tingkat pertumbuhan PDRB dengan migas Provinsi Riau selama tahun 2004-2008 berturut-turut dari tahun 2004 sebesar 2,93 persen, 5,41 persen, 5,15 persen, 3,41 persen dan terakhir tahun 2008 sebesar 5,65 persen.

Perkembangan aktivitas ekonomi Riau selanjutnya akan dianalisis secara lebih rinci dan terpisah antara PDRB tanpa migas dan PDRB dengan migas. Dari gambaran secara terpisah ini, dapat diketahui perkembangan perekonomian serta peran masing-masing sektor terhadap perekonomian Riau baik dengan migas maupun tanpa migas.

3.1 PDRB Riau Tanpa Migas

3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Selama lima tahun terakhir dalam kurun waktu tahun 2004-2008, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau berjalan stabil meskipun yang paling dominan mempengaruhi roda perekonomian Riau adalah dampak dari anjloknya harga sawit yang sempat menyentuh titik yang paling terendah di saat akhir tahun 2008. Hal

ini disebabkan perekonomian tanpa migas masyarakat Riau sangat terfokus pada agroindustri.

Sangat kebetulan sekali peristiwa yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi Provinsi Riau terjadinya di akhir tahun 2008 sehingga laju pertumbuhan ekonomi selama satu tahun 2008 masih dapat bertahan di delapan persen seperti tahun-tahun sebelumnya. Tercatat kondisi pertumbuhan ekonomi tiga tahun terakhir yakni di tahun 2006 sebesar 8,66 persen, tahun 2007 sebesar 8,25 persen dan tahun 2008 sebesar 8,06 persen.

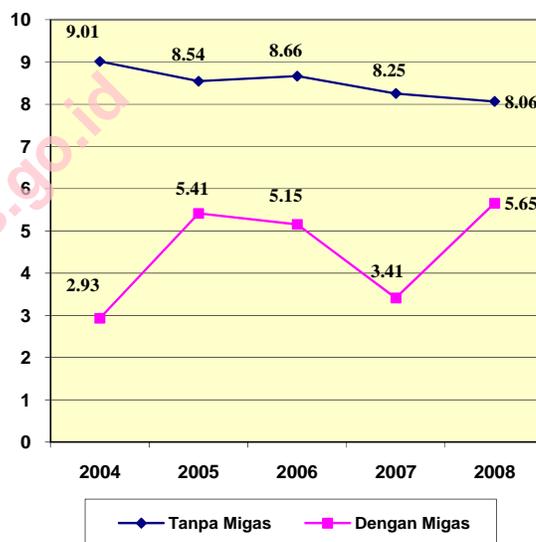
Secara sektoral, laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan non migas terutama karena tingginya kontribusi tingkat produksi batu bara. Meskipun tinggi namun tingkat produksinya cenderung merendah terlihat pada laju pertumbuhan sektor tersebut pada tahun 2005 sebesar 27,24 persen, tahun 2006 sempat mencapai 28,61 persen, tahun 2007 tumbuh sebesar 24,57 persen dan saat ini pada tahun 2008 tumbuh hanya sebesar 18,13 persen.

Eksplorasi pertambangan batu bara masih tergolong baru bila dibanding dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, untuk itu kemandiriannya masih perlu terus dibina oleh para pemangku kebijakan. Faktor utama kemandiriannya sangat tergantung pada cadangan potensial batu bara yang tersedia untuk dieksploitasi. Bila kenyataan

dilapangan ternyata cadangan potensial batu bara melimpah maka diharapkan di masa depan sebaiknya memformulkannya agar menjadi salah satu komoditas primadona Riau selain minyak bumi. Selain berlokasi di Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu mulai tahun 2008 Kabupaten Indragiri Hilir telah mulai memproduksi batu bara juga.

Grafik 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Riau, 2004-2008 (%)



Sementara itu, pertumbuhan tertinggi kedua terjadi di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sebesar 13,65 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh perkembangan aktivitas subsektor bank yang meningkat tajam. Pertumbuhan ekonomi subsektor bank tahun 2008 sangat tinggi hingga mencapai 22,09 persen, sedikit lebih tinggi dibanding tahun yang lalu sebesar 21,14 persen.

Peristiwa krisis global selayaknya akan berdampak negatif terhadap perekonomian suatu wilayah bila penerapan kebijakan dalam mengantisipasi krisis perekonomian tidak tepat sasaran sesuai kondisi dan kebutuhan. Pada tahun 2008 pihak perbankan yang merupakan salah satu institusi menangani krisis semakin yakin menyalurkan pemberian kredit kepada masyarakat khususnya sektor riil, hal ini selain bermanfaat sebagai proteksi terhadap krisis, juga memenuhi kepercayaan masyarakat karena semakin terkendalinya tingkat kredit macet yang telah disalurkan meskipun semakin beragamnya kredit (terutama kredit konsumsi). Ini membuktikan tingginya kemampuan konsumen mengimbangi tingkat suku bunga kredit.

Selain itu, tingginya pertumbuhan juga ditandai oleh perkembangan perbankan yang jumlahnya semakin tersebar merata dapat terjangkau hingga ke pedesaan. Kondisi ini membuka lebar kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses jasa perbankan. Pihak perbankan semakin mempermudah persyaratan permohonan kredit agar para konsumen mempunyai alasan yang tepat menjustifikasi pilihannya menggunakan jasa perbankan dibandingkan dengan jasa peminjaman lainnya. Inilah yang menjadi daya tarik para pebisnis swasta maupun masyarakat untuk memperlancar

dan mendorong kinerja wirausaha yang dilakukannya.

Selain kedua sektor di atas, pada tahun 2008 ini ada beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi, yakni tumbuh di atas 9 persen. Adapun sektor-sektor tersebut adalah sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa. Masing masing tumbuh sebesar 11,14 persen, 10,45 persen, 9,72 persen, dan 9,25 persen.

Masih sama seperti tahun lalu, sektor bangunan menciptakan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Tingginya pembangunan infrastruktur sangat erat diiringi dengan melambungnya permintahaan bangunan tempat tinggal dan kebutuhan bukan tempat tinggal. Program pembangunan infrastruktur multiyears masih belum tuntas, diantaranya pembangunan akses jalan provinsi yang menghubungkan antar kabupaten/kota se Provinsi Riau. Kemudian hampir seluruh kabupaten/kota berpacu membangun jembatan baik skala kecil hingga multiyears guna meningkatkan frekwensi dan memangkas efisiensi roda perekonomian wilayahnya masing-masing.

Pembangunan bukan tempat tinggal seperti gedung perkantoran, jalan, jembatan, pelabuhan dan infrastuktur lainnya baik yang dilakukan oleh pihak swasta seperti sarana bisnis berupa pusat perbelanjaan (*mall*), ruko, perhotelan, dan pengembangan melalui

developer ikut pula mendorong pesatnya pertumbuhan pada sektor ini. Animo masyarakat masih tetap tinggi untuk memiliki bangunan tempat tinggal menggunakan jasa berbagai developer perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Tidak ketinggalan juga semakin menjamurnya perumahan mewah real estate sebagai respon permintaan konsumen menengah ke atas khususnya banyak terdapat pada segmen daerah perkotaan.

Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 10,45 persen. Tercapainya pertumbuhan tersebut merupakan refleksi dari program pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang sedang giat dikerjakan, khusus akses transportasi darat antar kab/kota, antar kecamatan dan antardesa. Akses yang telah ada semakin ditingkatkan baik segi kuantitas maupun kualitasnya guna memacu seluruh roda perekonomian dan ternyata berdampak langsung terhadap tingkat pertumbuhan subsektor angkutan darat. Kemudian kenyamanan dalam berusaha, stabilitas keamanan daerah Riau yang kondusif dan didukung oleh semakin terpenuhinya standar pelayanan, prasarana dan sarana angkutan udara menjadi pendorong tingginya aktivitas di subsektor ini. Peningkatan kebutuhan masyarakat berkenaan menjaga efektivitas berbisnis sangat mendambakan jasa angkutan udara,

pihak maskapai penerbangan merespon dengan langkah menambah beberapa pesawat armada penerbangan dan membuka baru jalur penerbangan. Dengan demikian percepatan peningkatan nilai tambah subsektor angkutan udara semakin menjanjikan.

Sementara itu, tingginya penggunaan telepon selular yang saat ini telah mulai menjadi kebutuhan dasar dan *trendy* dalam berinteraksi sosial maupun bisnis memicu bertambahnya jumlah pelanggan. Persaingan harga melalui berbagai jenis kartu yang ditawarkan oleh para *provider* menyebabkan harga pulsa bersaing murah dan tanpa terasa frekwensi konsumen pengguna telepon seluler semakin sering mengkonsumsi pulsa dalam berkomunikasi.

Berikutnya, selama tahun 2008 laju pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang cukup sebesar 9,72 persen. Semakin tinggi minat masyarakat Provinsi Riau merupakan faktor dominan terhadap tumbuhnya pasar modern, sehingga perkembangan perekonomian sektor ini tumbuh cukup baik. Kemudian maraknya transaksi jual beli barang dan jasa khususnya barang-barang tahan lama (*durable goods*), seperti barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor. Besarnya jumlah kendaraan bermotor yang masuk ke Riau berkorelasi positif memacu naiknya transaksi perdagangan. Sementara, tumbuhnya hotel dan penginapan baru

sejalan dengan mengimbangi permintaan konsumen turut memberi pengaruh terhadap penciptaan nilai tambah subsektor hotel. Semakin maraknya berbagai jenis makanan dan dengan cukup kuatnya daya beli sebagian masyarakat masyarakat Riau telah turut memacu peningkatan subsektor restoran.

Bersamaan dengan sektor di atas, sektor jasa-jasa selama tahun 2008 menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar sebesar 9,25 persen. Sektor ini utamanya didorong oleh pertumbuhan jasa pemerintahan sebesar 9,20 persen dan jasa swasta sebesar 9,41 persen. Jumlah Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar secara tidak langsung meningkatkan anggaran belanja barang pemerintah. Selain itu, pemberian tambahan tunjangan untuk pegawai pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten signifikan meningkatkan nilai tambah subsektor jasa pemerintahan. Sementara pertumbuhan subsektor jasa swasta disebabkan oleh peningkatan komoditas jasa sosial kemasyarakatan sebesar 8,98 persen, jasa hiburan dan rekreasi sebesar 9,75 persen, dan jasa perseorangan dan rumah tangga sebesar 9,40 persen.

Berikutnya laju pertumbuhan sektor industri tanpa migas tercatat sebesar 8,98 persen. Sama seperti tahun lalu, pertumbuhan ini karena lebih dipacu oleh

meningkatnya subsektor industri makanan, minuman dan tembakau, serta subsektor industri kertas dan barang cetakan. Secara umum selama setahun 2008, permintaan atas CPO di pasar dunia masih tergolong tinggi sehingga telah memicu pertumbuhan subsektor industri makanan, minuman dan tembakau. Sejalan dengan hal tersebut, penciptaan berbagai jenis produk dari industri makanan dan minuman di wilayah Riau ternyata masih tetap tinggi diterima oleh pasar. Sementara itu, masih perkembangan produksi kertas dan bubur kertas dari Riau dipacu oleh masih besarnya permintaan pasar dunia terhadap komoditas ini.

Tabel 3.1.1
Pertumbuhan Ekonomi Riau Tanpa Migas
atas Dasar Harga Konstan 2000, 2004-2008
(%)

Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	7,00	6,77	5,97	4,84	4,79
2. Pertambangan	34,07	27,24	28,61	24,57	18,13
3. Industri	10,14	9,08	9,11	11,41	8,98
4. Listrik dan air	10,44	9,20	5,86	5,62	6,86
5. Bangunan	9,10	7,15	8,27	11,65	11,14
6. Perdagangan	9,37	10,15	11,29	8,94	9,72
7. Angkutan	11,85	10,46	9,62	7,28	10,45
8. Keuangan	18,92	18,18	15,67	13,33	13,65
9. Jasa-Jasa	9,06	7,92	9,94	9,71	9,25
Total PDRB	9,01	8,54	8,66	8,25	8,06

Sumber: BPS Provinsi Riau

Sementara itu sektor listrik dan air selama tahun 2008 ini tumbuh sebesar 6,86

persen, setahun yang lalu pada tahun 2007 tumbuh sebesar 5,62 persen dan sempat tumbuh sebesar 10,44 persen pada tahun 2004. Semakin cepat roda perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu mengharuskan dunia usaha dan masyarakat mendongkrak tingkat kebutuhan akan energi listrik dan air. Sektor ini belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tersebut oleh karena keterbatasan sumber daya yang dihasilkan. Akibatnya secara series sektor ini pertumbuhannya semakin lama cenderung merendah. Ini merupakan konsekuensi dari tingginya percepatan perekonomian yang tidak diiringi oleh tingginya investasi pembangunan pembangkit listrik. Pada saat ini kapasitas yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan dari perekonomian. Untuk itu dimasa mendatang sangat diperlukan kebijakan pemerintah yang tepat dalam mengatasi krisis energi ini.

Terakhir adalah sektor pertanian, sektor pertanian yang memiliki pertumbuhan paling kecil yaitu 4,79 persen selama tahun 2008. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perlambatan dari subsektor kehutanan. Meskipun tingkat pertumbuhan subsektor kehutanan selama tahun 2007 sebesar 2,21 persen menjadi 0,87 persen selama tahun 2008. Melambatnya pertumbuhan pada subsektor kehutanan karena rendahnya tingkat produksi yang merupakan dampak dari adanya peraturan *illegal logging* dan kapasitas hutan yang tersedia sudah sangat

menipis. Tingkat pertumbuhan di subsektor kehutanan hendaknya menjadi perhatian pemerintah Provinsi Riau, program revitalisasi kehutanan selayaknya lebih giat dan gencar dicanangkan dan menjadi salah satu agenda utama.

3.1.2 Kontribusi Sektoral

Struktur ekonomi Riau secara sektoral menggambarkan kontribusi atau peran setiap sektor ekonomi terhadap total perekonomian di Riau. Melalui kontribusi ini maka kita dapat mengukur seberapa besar kemampuan daya ungkit (*leverage*) dari setiap sektor ekonomi dalam menggerakkan roda perekonomian.

Tabel 3.1.2
Distribusi PDRB Riau Tanpa Migas
atas Dasar Harga Berlaku, 2004-2008
(%)

Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	36.66	38.16	38.28	37,25	35,63
2. Pertambangan	0.72	0.85	1.32	1.72	2,02
3. Industri	32.68	31.86	30.84	30.16	29,29
4. Listrik dan air	0.41	0.38	0.36	0.34	0.31
5. Bangunan	4.88	4.39	4.49	6,02	7,58
6. Perdagangan	11.47	11.54	11.79	12,02	12,95
7. Angkutan	3.56	3.41	3.39	3,29	3,26
8. Keuangan	3.07	3.25	3.31	3,35	3,40
9. Jasa-Jasa	6.54	6.17	6.23	5,86	5,55
T o t a l	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Provinsi Riau

Pada Tabel 3.1.2 tampak bahwa struktur ekonomi tanpa migas Riau pada

tahun 2008 masih didominasi oleh tiga sektor yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan yang ketiganya memberikan kontribusi sebesar 77,87 persen, dimana peran masing-masing adalah sebesar 35,63 persen, 29,29 persen, dan 12,95 persen. Dengan memperhatikan peran yang besar dari ketiga sektor tersebut diharapkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah diarahkan untuk dapat mempertahankan sekaligus mendorong berputarnya roda perekonomian dari ketiga sektor ini.

Kontribusi terbesar terhadap perekonomian Riau diberikan oleh sektor pertanian. Berdasarkan perkembangan yang semakin pesat pada subsektor perkebunan dan semakin mahalnya harga dari hasil produksi subsektor kehutanan akan lebih banyak memberi sumbangan perkembangan pada sektor pertanian secara keseluruhan. Selanjutnya, besarnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Riau oleh karena nilai tambah yang dicapai oleh industri pengolahan bahan kertas dan kertas, industri pengolahan kayu, dan industri pengolahan kelapa sawit yang cukup besar dalam perekonomian.

Kontribusi terhadap perekonomian terbesar berikutnya bersumber dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran yaitu sebesar 12,95 persen, hal ini terutama disebabkan oleh tingginya kecepatan perputaran barang dalam perekonomian

hingga ke konsumen akhir. Khususnya terjadi pada barang-barang tahan lama (*durable goods*), seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, dan HP. Selain itu akibat membaiknya prasarana transportasi serta berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan baru berperan menjadikan motor mempercepat perputaran barang dan konsumen semakin mudah memperolehnya.

Perkembangan konstruksi dalam perekonomian suatu wilayah tergambar dari perkembangan PDRB sektor bangunan. Pada tahun 2008 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 7,58 persen terhadap perekonomian Riau. Sektor lainnya yaitu sektor pertambangan non migas, meskipun sektor ini memiliki pertumbuhan tertinggi namun dalam perekonomian ternyata kontribusinya masih sangat kecil yakni hanya 2,02 persen saja. Hal ini barangkali oleh karena eksploitasi dan eksplorasi produksi komoditas batu bara masih baru.

Kemudian kondisi yang sama terjadi pada sektor listrik dan air bersih. Keterbatasan daya serta kurangnya sumber pembangkit listrik yang baru menyebabkan kontribusi sektor listrik dan air bersih terhadap perekonomian sangat sulit berkembang. Pada tahun 2008 sektor ini hanya memberikan kontribusi sebesar 0,31 persen.

3.1.3 PDRB dan Pendapatan Per Kapita

Berdasarkan PDRB dan pendapatan per kapita Riau akan mencerminkan secara tak langsung seberapa tinggi tingkat kemakmuran yang telah dicapai penduduk Riau. Bila disajikan secara berkala, data tersebut akan dapat menunjukkan adanya perubahan kemakmuran yang terjadi di daerah tersebut, sehingga dapat diinterpretasikan apakah perubahannya menunjukkan ke arah yang semakin membaik atau sebaliknya.

Data tentang PDRB dan pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu daerah. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk yang ada di suatu daerah sangat berpengaruh terhadap besar-kecilnya nilai PDRB per kapita dan pendapatan per kapita.

Dari Tabel 3.1.3 terlihat bahwa PDRB per kapita tanpa migas atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2004-2008 mengalami peningkatan yang cukup nyata yaitu dari 14,28 juta rupiah di tahun 2004 naik menjadi 23,08 juta rupiah di tahun 2007 kemudian meningkat lagi menjadi 28,74 juta rupiah pada tahun 2008. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh perkembangan subsektor perkebunan, subsektor pertambangan, dan subsektor industri pengolahan. Disamping itu kemajuan perkembangan subsektor perdagangan, jasa dan restoran juga sangat berperan besar.

Tabel 3.1.3
PDRB dan Pendapatan Per Kapita Riau
Tanpa Migas, 2004-2008
(Juta Rp)

Rincian	Berlaku	Konstan 2000
(1)	(2)	(3)
PDRB PER KAPITA		
2004	14,28	6,83
2005	17,27	7,32
2006	19,91	7,65
2007	23,08	7,77
2008	28,74	8,21
PENDAPATAN PER KAPITA		
2004	13,05	6,25
2005	15,78	6,69
2006	18,20	6,99
2007	21,01	7,11
2008	26,27	7,50

Sumber: BPS Provinsi Riau

Pada periode yang sama, secara riil melalui PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000, menunjukkan arah yang juga meningkat dari 6,83 juta rupiah di tahun 2004 naik menjadi 7,77 juta rupiah di tahun 2007 dan meningkat lagi menjadi 8,21 juta rupiah di tahun 2008. Ini berarti ada peningkatan daya beli secara riil penduduk Riau selama periode tersebut. Kemudian masih dari Tabel 3.1.3, seiring dengan perkembangan PDRB per kapita maka pendapatan per kapita Riau atas dasar harga berlaku selama periode 2004-2008 juga mengalami kenaikan, dari 13,05 juta rupiah di tahun 2004 menjadi 26,27 juta rupiah atau naik 2,01 kali pada tahun 2008.

Pada kurun waktu yang sama, secara riil tampaknya pendapatan per kapita memiliki pola yang sama dengan PDRB per

kapita yang juga mengalami kenaikan dari sebesar 6,25 juta rupiah di tahun 2004 menjadi 7,50 juta rupiah atau naik 20,15 persen pada tahun 2008.

3.2 PDRB Dengan Migas

Minyak bumi merupakan salah satu komoditas yang sangat potensial dan merupakan andalan bagi Provinsi Riau. Minyak bumi adalah salah satu bahan bakar yang banyak digunakan untuk berbagai aktivitas ekonomi, antara lain untuk menggerakkan proses di sektor pertanian, sektor industri, sektor listrik dan air bersih, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor transportasi. Seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia, secara tidak langsung kontribusi minyak bumi terhadap perekonomian Riau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

3.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran tingkat pertumbuhan Ekonomi Riau setelah memasukkan unsur migas selama kurun waktu 2004-2008 ternyata berfluktuasi. Pada Tabel 3.2.1, terlihat jelas tentang laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dari hanya sebesar 2,93 persen pada tahun 2004 kemudian meningkat menjadi 5,41 persen pada tahun 2005 dan kembali melemah menjadi 3,41 persen selama tahun 2007. Pada tahun 2008

laju pertumbuhannya tinggi lagi menjadi sebesar 5,65 persen.

Tabel 3.2.1
Pertumbuhan Ekonomi Riau Dengan Migas,
atas Dasar Harga Konstan 2000, 2004-2008
(%)

Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	7,00	6,77	5,97	4,84	4,71
2. Pertambangan	-1,19	3,71	2,91	-0,13	3,93
3. Industri	9,53	5,60	6,78	8,63	7,18
4. Listrik dan air	10,44	9,20	5,86	5,62	6,86
5. Bangunan	9,10	7,15	8,27	11,65	11,14
6. Perdagangan	9,37	10,15	11,29	8,94	9,72
7. Angkutan	11,85	10,46	9,62	7,28	10,45
8. Keuangan	18,92	18,18	15,67	13,33	13,65
9. Jasa-Jasa	9,06	7,92	9,94	9,71	9,25
Total PDRB	2,93	5,41	5,15	3,41	5,65

Sumber: BPS Provinsi Riau

Semakin lemahnya tingkat produksi subsektor pertambangan migas merupakan faktor utama yang memicu rendahnya pertumbuhan sektor pertambangan migas sehingga berdampak juga pada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Pada tahun 2004 tingkat produksi subsektor pertambangan melemah dan implikasinya akan melemahkan laju pertumbuhan subsektor ini, tercatat laju pertumbuhannya mengalami kontraksi sebesar 1,19 persen. Setahun berikutnya tingkat produksi membaik sehingga laju pertumbuhannya meningkat menjadi 3,71 persen. Dalam perjalanan selama tahun 2007 melemah kembali dan laju pertumbuhannya sebesar -

0,13 persen dan pada tahun 2008 naik lagi menjadi 3,93 persen.

Selanjutnya pada tahun 2008 ini sektor industri pengolahan mengalami perlambatan pertumbuhan bila dibandingkan tahun 2007, dimana sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 7,18 persen lebih lemah dari tahun sebelumnya tahun 2007 yang tercatat sebesar 8,63 persen. Rendahnya laju pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan percepatan tingkat produksi industri pengolahan non migas lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tingkat produksi industri pengolahan non migas pada tahun 2007 menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,98 persen, sedangkan tahun 2007 telah tumbuh sebesar 11,41 persen.

Dengan melihat lebih seksama secara umum Grafik 3.1 dan berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas terlihat selalu lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan ekonomi Riau dengan migas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tanpa migas lebih stabil pada kisaran rata-rata di atas 8 persen, sementara pertumbuhan ekonomi dengan migas senantiasa berfluktuatif.

3.2.2 Kontribusi Sektoral

Setelah mencermati perkembangan perekonomian Provinsi Riau dengan memasukkan unsur migas maka akan terlihat

nyata dominasi sektor pertambangan dan penggalian dalam perekonomian. Sektor ini mampu memberi kontribusi paling besar pada tahun 2008 hingga mencapai angka 44,78 persen. Angka sebesar itu terutama disumbangkan oleh subsektor minyak dan gas bumi yang tercatat sebesar 43,69 persen.

Hanya dengan satu sektor ini hampir separuh perekonomian Riau bergantung kepadanya, sehingga sektor ini diharapkan dapat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi di Riau, yang tentunya perlu didukung dengan berbagai kebijakan kondusif dari *stakeholders*. Namun, perlu juga melakukan tindakan antisipasi guna mencari sumber daya ekonomi lain yang dapat dikembangkan di masa mendatang karena migas sebagai *unre-newable resources* tidak selamanya dapat diandalkan. Ini mulai terlihat dengan eksploitasi komoditas batu bara sebagai alternatif komoditas unggulan lain.

Pada Tabel 3.2.2, tampak bahwa selama periode 2004-2008 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sekitar 41-44 persen lebih. Sementara sektor pertanian dan sektor industri pada tahun 2008 berkontribusi masing-masing sebesar 19,92 persen dan 18,15 persen. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang pembentukan PDRB Riau dengan migas yakni sekitar 6,99 persen.

Dengan mencermatinya lebih mendalam ternyata perekonomian Riau

mengarah pada perubahan struktur ekonomi yang positif. Sebelum tahun 2004-2008 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian selalu di atas 50 persen, tetapi pada periode tersebut perannya mulai digantikan oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan. Disamping itu, secara ekonomi regional kedua sektor ini lebih menyentuh ke masyarakat tempatan dan unggul dari sisi akses nilai tambahnya karena berpeluang besar berkontribusi langsung ke segala lapisan masyarakat tempatan. Perubahan ini bagus karena di masa mendatang ketergantungan terhadap minyak bumi tidak baik sebab secara perlahan kandungan minyak bumi akan habis.

Tabel 3.2.2
Distribusi PDRB Riau Dengan Migas
atas Dasar Harga Berlaku, 2004-2008
(%)

Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	20,71	21,70	21,72	20,76	19,92
2. Pertambangan	41,56	41,67	42,15	43,39	44,78
3. Industri	20,83	20,06	19,34	18,65	18,15
4. Listrik dan air	0,23	0,22	0,20	0,19	0,17
5. Bangunan	2,76	2,49	2,55	3,35	4,09
6. Perdagangan	6,48	6,56	6,69	6,70	6,99
7. Angkutan	2,01	1,94	1,93	1,83	1,76
8. Keuangan	1,74	1,85	1,88	1,87	1,83
9. Jasa-Jasa	3,70	3,51	3,53	3,26	3,00
T o t a l	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Riau

Sama halnya dengan kontribusi ekonomi tanpa migas sektor dengan peran paling rendah selama periode 2004-2008

adalah sektor listrik dan air bersih dan bahkan peranannya terhadap pembentukan PDRB Riau dengan migas di bawah 0,25 persen. Pada tahun 2008 hanya sebesar 0,17 persen, melihat peranan sektor ini yang sangat rendah, baik pada struktur ekonomi tanpa maupun dengan migas, diharapkan muncul kebijakan yang dapat mendorong kemajuannya mengingat keberadaannya menjadi salah satu faktor penting dan sangat dibutuhkan.

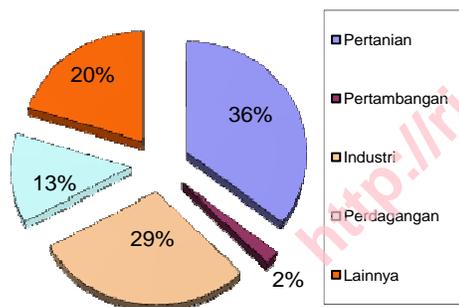
Kemudian mobilitas komoditas, tingkat produksi dan lain sebagainya yang berkaitan langsung dengan faktor produksi akan sangat tergantung pada sektor angkutan dan komunikasi. Sehingga sektor ini sangat berperan penting dalam bertugas mendistribusikan barang dan jasa dari suatu tempat (daerah) ke tempat tujuan (daerah lain) dengan aman dan efektif, dan juga sebagai sarana berkomunikasi antar pelaku ekonomi agar aktivitas ekonominya lancar dan efisien. Namun, melihat angka kontribusinya yang hanya dibawah 2 (dua) persen selama periode 2004-2008, artinya masih jauh dari harapan. Semoga dengan semakin pesatnya perekonomian di Riau, prasarana dan sarana jalan akan semakin baik. Sehingga distribusi barang melalui akses dari satu daerah ke daerah lain semakin bertambah lancar.

Secara umum selama kurun waktu tahun 2004-2008, peran sektor bangunan (konstruksi) pada perekonomian Riau

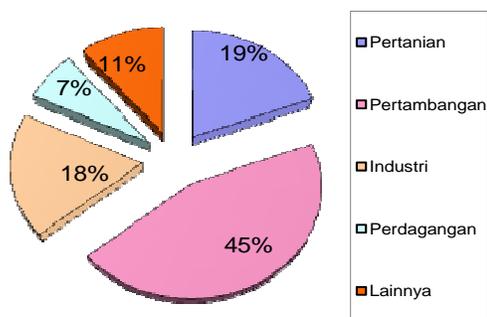
dengan migas juga masih tergolong kecil, selama tahun 2007 kontribusinya sedikit berkembang dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 3,35 persen dan terakhir tahun 2008 menembus angka sebesar 4,09 persen. Ini berarti bahwa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi Riau selama tahun 2007 dan 2008 berkembang dengan baik dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun demikian program pemerintah guna mengejar ketertinggalan infrastruktur tetap harus terus menjadi prioritas.

Grafik 3.2
Distribusi PDRB Riau atas Dasar
Harga Berlaku, 2007
(%)

A. Tanpa Migas



B. Dengan Migas



Sektor keuangan juga tampaknya mulai stabil didalam memberikan kontribusinya terhadap perekonomian Riau dengan migas. Semakin pulihnya kepercayaan perbankan kepada pengusaha sektor riil dan masyarakat dengan memberikan akses kemudahan sehingga masyarakat dan pelaku sektor riil lebih berani dalam mengambil kredit dari perbankan. Selain itu, adanya jaminan dari pemerintah pusat dan pemprov lebih mempermudah proses memperoleh kredit bagi usaha kecil dan menengah.

Tampaknya perkembangan setiap sektor, baik dari segi pertumbuhan maupun kontribusi di dalam perekonomian Riau tanpa atau dengan migas semakin menunjukkan arah yang positif menuju pencapaian Visi Riau 2020 yakni "Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu di kawasan Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera Lahir dan Bathin pada tahun 2020". Namun begitu hendaknya pemerintah tidak cepat puas dengan pencapaian saat ini. Masih banyak pembenahan pada sektor-sektor tertentu yang harus dikejar dimasa yang akan datang.

3.2.3 PDRB dan Pendapatan Per Kapita

Sebagai salah satu ukuran makro tentang kemakmuran di suatu daerah maka PDRB dan Pendapatan Per Kapita menjadi perlu untuk dianalisis. Pada Tabel 3.2.3

terlihat bahwa PDRB maupun Pendapatan Per Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama periode 2004-2008. Sementara secara riil (atas dasar harga konstan) juga menunjukkan adanya kecenderungan meningkat selama periode 2004-2008.

Tabel 3.2.3
PDRB dan Pendapatan Per Kapita Riau
Dengan Migas, 2004-2008
(Juta Rp)

Rincian	Berlaku	Konstan 2000
(1)	(2)	(3)
PDRB PER KAPITA		
2004	25,28	16,64
2005	30,36	17,31
2006	35,08	17,51
2007	41,41	17,00
2008	53,26	17,55
PENDAPATAN PER KAPITA		
2004	23,10	15,21
2005	27,75	15,83
2006	32,07	16,00
2007	37,86	15,54
2008	48,69	16,05

Sumber: BPS Provinsi Riau

Pada tahun 2004, PDRB per kapita Riau atas dasar harga berlaku mencapai 25,28 juta rupiah meningkat menjadi 53,26 juta rupiah di tahun 2008. Sementara secara riil, PDRB per kapita Riau di tahun 2004 sebesar 16,64 juta rupiah menjadi 17,55 juta rupiah pada tahun 2008, atau naik sebesar 5,47 persen.

Sedangkan gejala pendapatan per kapita tampak sama dengan kondisi PDRB per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun dilihat secara riilnya.

Seiring dengan PDRB per kapita, selama tahun 2004-2008, pola pendapatan per kapita juga menunjukkan hal yang sama, yakni pada harga berlaku menunjukkan arah yang meningkat dari 23,10 juta rupiah di tahun 2004 menjadi 48,69 juta rupiah pada tahun 2008. Sementara secara riil, pendapatan per kapita Riau di tahun 2004 sebesar 15,21 juta rupiah menjadi 16,05 juta rupiah pada tahun 2008, atau naik sebesar 5,52 persen.

4

Perkembangan PDRB

Antar Daerah

BAB IV

PERBANDINGAN PDRB ANTAR DAERAH

Bab ini menyajikan perbandingan beberapa ukuran makro ekonomi, yang diturunkan dari PDRB di masing-masing provinsi, dan sekaligus untuk menggambarkan posisi Riau di antara provinsi lain se-Sumatera dan Indonesia. Beberapa ukuran makro ekonomi yang diperbandingkan adalah laju pertumbuhan, struktur ekonomi dan PDRB Per Kapita.

Perkembangan PDRB se-Sumatera

Letak geografis Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan beberapa provinsi seperti provinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Kepulauan Riau, selain itu, Riau juga berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Setelah pisah dengan Kepulauan Riau, Provinsi Riau telah menyiapkan pelabuhan khusus sebagai tempat bongkar muat barang yang terletak di Kota Dumai. Ini menjadikan Provinsi Riau sering kali via Kota Dumai sebagai daerah jangkar untuk melakukan ekspor dari berbagai daerah *hinterland*. Disamping itu, letak geografis Provinsi Riau merupakan jalur lintas Sumatera yang banyak digunakan untuk mengangkut berbagai komoditas barang dan jasa dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa atau sebaliknya.

Dengan letak geografis Provinsi Riau yang strategis tersebut menjadikan Provinsi Riau secara ekonomi sangat menguntungkan. Sebagai daerah persimpangan jalan dan jalur lintasan atau transit, kegiatan ekonomi masyarakatnya memberikan dampak langsung dan tidak langsung bagi terciptanya kegiatan produksi dan nilai tambah. Misalnya, dengan melakukan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara dan provinsi lain, yang akan menciptakan dan mendorong kesempatan berusaha yang saling menguntungkan. Dengan demikian kerjasama seperti itu akan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi regional. Dengan posisi yang strategis tersebut, Provinsi Riau semakin diperhitungkan di dalam perekonomian nasional dan regional.

4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kenaikan BBM di tahun 2005 terjadi krisis ekonomi pertama dan sejak pertengahan tahun 2006 kondisi makro ekonomi telah pulih kembali sehingga seluruh proses kegiatan produksi dan penciptaan nilai tambah di hampir seluruh provinsi di Indonesia berkembang lagi seperti sediakala.

Pada akhir tahun 2008 kembali terjadi krisis global dan merata melanda dunia yang titik krisis berawal dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Berbekal pengalaman krisis perekonomian terdahulu, Indonesia dapat melewatinya dengan baik terbukti dari pertumbuhan ekonomi selama tahun 2008 masih bergerak positif.

Seperti pada Tabel 4.1.1 terlihat pada tahun 2008 semua provinsi di Sumatera mengalami pertumbuhan ekonomi positif meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan bila dibandingkan tahun 2007. Pada tahun 2008, Provinsi Riau ternyata masih menjadi motor pemicu paling utama dalam menggerakkan roda perekonomian se-Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni mencapai 8,06 persen. Lalu diikuti Provinsi Jambi yang mencapai 7,36 persen, Kepulauan Riau sebesar 7,22 persen, Sumatera Utara sebesar 6,40 persen, Sumatera Barat sebesar 6,37 persen, dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,03 persen. Bahkan angka pertumbuhan ekonomi Riau tersebut masih lebih tinggi dari pertumbuhan se-Sumatera dan nasional yang masing-masing sebesar 6,11 persen dan 6,52 persen.

Masih pada Tabel 4.1.1, terlihat selama periode 2004-2008 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau menempati posisi tertinggi di Sumatera. Dengan posisi

pertumbuhan Provinsi Riau yang selalu di atas provinsi lain se-Sumatera dan adanya kerjasama serta kesepahaman yang dilakukan oleh para petinggi se-Sumatera dan negara Malaysia serta Singapura, diharapkan Provinsi Riau dapat menjadi motor terdepan di dalam rangka memajukan perekonomian se-Sumatera. Ini tidak terlepas dari upaya Pemprov Riau dalam mewujudkan Visi Riau 2020. Beberapa pembangunan infrastruktur baru telah dibangun atau ditingkatkan lagi kualitasnya seperti pelabuhan internasional di Buton dan pengembangan pelabuhan laut di Dumai untuk menjadi pelabuhan perdagangan bebas.

Tabel 4.1.1
Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas
Provinsi se-Sumatera atas Dasar Harga
Konstan 2000, 2004-2008
(%)

PROVINSI	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. NAD	1,76	1,22	7,70	7,02	1,89
2. Sumut	6,00	5,52	6,26	6,89	6,40
3. Sumbar	5,46	5,73	6,14	6,34	6,37
4. Riau	9,01	8,54	8,66	8,25	8,06
5. Jambi	6,48	6,25	8,35	6,58	7,36
6. Sumsel	6,79	6,91	7,31	8,04	6,34
7. Bengkulu	5,38	5,82	5,95	6,03	4,93
8. Lampung	5,76	4,61	5,31	6,14	4,57
9. Kep.Babel	4,34	4,60	4,80	5,37	5,03
10. Kepri	7,42	7,08	7,23	7,55	7,22
SUMATERA	6,08	5,77	6,89	7,07	6,11
INDONESIA	5,97	6,57	6,11	6,87	6,52

Sumber: BPS Provinsi Riau

Dari data historis selama periode 2004-2008 tersebut memberi isyarat bahwa perkembangan perekonomian Provinsi Riau dalam beberapa tahun mendatang akan cenderung meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi yang terjadi secara nasional dan di beberapa negara ASEAN. Oleh karenanya, cukup banyak para investor dari berbagai negara ASEAN yang berminat untuk menanamkan modalnya di Riau

4.2 Kontribusi PDRB

Kontribusi Provinsi se-Sumatera terhadap penciptaan ekonomi nasional (total 33 provinsi seluruh Indonesia) selama periode 2004-2008 berkisar pada angka 19,28 persen sampai dengan 20,34 persen, seperti yang terlihat pada Tabel 4.1.2, kontribusinya sedikit mengalami penurunan pada tahun 2004-2005 yaitu dari 19,95 persen menjadi 19,72 persen. Penurunan ini disebabkan adanya peningkatan kontribusi ekonomi dari Kawasan Timur Indonesia terutama NTT, NTB, Irian, dan Maluku. Kemudian pada tahun 2007 kontribusinya bertambah besar menjadi sebesar 20,34 persen dan akhir tahun 2008 kembali mengecil menjadi sebesar 19,28 persen.

Penyebab perubahan kontribusi tersebut diperkirakan akibat adanya perbedaan pada realisasi potensi sumber daya alam, infrastruktur, modal yang

tersedia, dan kemampuan sumber daya manusia di masing-masing provinsi sehingga membuat kontribusi PDRB menjadi bervariasi baik antar provinsi maupun antar pulau.

Tabel 4.1.2
Distribusi PDRB Tanpa Migas Provinsi se-Sumatera atas Dasar Harga Berlaku 2004-2008 (%)

PROVINSI	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. NAD	1,51	1,49	1,61	1,63	1,40
2. Sumut	5,89	5,82	5,71	5,69	5,34
3. Sumbar	1,88	1,88	1,90	1,88	1,77
4. Riau	3,24	3,32	3,40	3,69	3,75
5. Jambi	0,79	0,77	0,79	0,84	0,78
6. Sumsel	2,28	2,21	2,28	2,36	2,23
7. Bengkulu	0,41	0,43	0,41	0,40	0,36
8. Lampung	1,75	1,66	1,71	1,80	1,73
9. Kep.Babel	0,53	0,57	0,55	0,55	0,54
10. Kepri	1,69	1,57	1,50	1,49	1,35
SUMATERA	19,95	19,72	19,86	20,34	19,28
LAINNYA	80,03	80,28	80,14	79,66	81,72
TOTAL 30 PROVINSI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Riau

Selama periode 2004-2008, di Sumatera yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional diberikan oleh Sumatera Utara dengan peran berada di atas 5 persen. Peran tersebut sedikit menurun, tercatat bahwa di tahun 2006 mampu memberikan kontribusi sebesar 5,71 persen, lalu turun menjadi 5,69 persen pada tahun 2007 dan menjadi 5,34 selama tahun 2008. Sementara, Bengkulu menduduki peringkat terendah

dalam memberikan kontribusinya terhadap ekonomi nasional yakni hanya mampu mencapai di bawah 0,36 persen.

Untuk Riau dengan kontribusi di tahun 2008 sebesar 3,75 persen berada pada urutan kedua setelah Sumatera Utara, sedangkan nomor tiga adalah Sumatera Selatan. Namun demikian, peran ekonomi Riau terlihat cenderung meningkat, yakni dari sebesar 3,40 persen di tahun 2006 naik menjadi 3,69 persen pada tahun 2007. Dengan kondisi ini, agar peran Riau semakin diperhitungkan di dalam perekonomian nasional dan regional maka ada baiknya untuk memperbaiki beberapa kondisi seperti infrastruktur, dan sumber daya manusia serta melakukan terobosan kebijakan strategis lainnya, untuk mampu lebih optimal menggali potensi sumber daya alam yang ada. Sehingga harapan Riau yang tertuang dalam Visi Riau 2020 semakin dapat diwujudkan. Hal ini tentunya menjadi tantangan berat namun sekaligus dapat menjadi stimulus untuk pemacu pembangunan perekonomian di Bumi Lancang Kuning.

4.3 PDRB Per Kapita

Tingkat kemakmuran masyarakat di suatu daerah dapat ditinjau dari berbagai sisi baik dari sisi kesejahteraan rakyat (kesra) maupun ekonomi. Beberapa indikator dapat dijadikan ukuran kemakmuran misalnya bidang kesehatan

seperti indikator angka harapan hidup, apabila angka harapan hidup meningkat maka dapat dikatakan di daerah itu kemakmuran meningkat pula. Sedangkan dari sisi ekonomi biasanya kemakmuran suatu daerah diukur melalui indikator makro ekonomi seperti PDRB per kapita. Dengan penyajian series angka PDRB per kapita dapat diikuti perkembangan atas kemakmuran di suatu daerah tersebut. Nilai PDRB per kapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun.

Dari Tabel 4.1.3 tampak bahwa PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Sumatera pada tahun 2004 sebesar 8,77 juta rupiah lalu meningkat menjadi sebesar 15,74 juta rupiah pada tahun 2008, sehingga ada peningkatan sebesar 79,47 persen dalam kurun waktu empat tahun. Begitu pula pada periode yang sama, perkembangan secara riil yang dicerminkan oleh PDRB per kapita atas dasar harga konstan, juga mengalami peningkatan, pada tahun 2004 PDRB per kapita atas dasar harga konstan sebesar 6,07 juta rupiah naik menjadi 7,25 juta rupiah di tahun 2008, ada kenaikan sebesar 19,43 persen.

Sementara itu PDRB per kapita Riau atas dasar harga berlaku pada tahun 2008 yang mencapai sebesar 27,74 juta rupiah, menempatkan Riau berada pada

Tabel 4.1.3
PRDB Per Kapita Tanpa Migas menurut Provinsi se-Sumatera, 2004-2008
(Juta Rupiah)

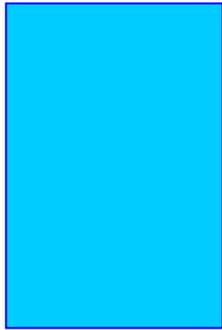
PROVINSI	ATAS DASAR HARGA BERLAKU					ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000				
	2004	2005	2006	2007	2008	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. NAD	7,37	8,79	11,02	12,20	13,02	5,44	5,58	5,96	6,15	6,16
2. Sumut	9,67	11,13	12,59	14,05	16,27	6,82	7,01	7,33	7,72	8,08
3. Sumbar	8,24	9,78	11,45	12,73	14,83	6,08	6,39	6,68	7,01	7,35
4. Riau	14,28	17,27	19,91	23,08	27,74	6,83	7,32	7,65	7,77	8,21
5. Jambi	5,97	6,98	8,23	9,55	10,94	3,97	4,19	4,37	4,66	4,92
6. Sumsel	6,86	7,77	9,20	10,67	12,47	5,12	5,35	5,65	6,00	6,29
7. Bengkulu	5,23	6,41	7,12	7,93	8,80	3,81	3,03	4,22	4,34	4,48
8. Lampung	4,94	5,53	6,62	8,16	9,69	3,90	4,05	4,21	4,42	4,56
9. Kep. Babel	10,33	13,00	14,24	15,69	18,91	7,39	8,03	8,17	8,37	8,66
10. Kepri	28,20	29,35	31,36	34,04	37,06	22,37	22,42	22,89	23,65	24,30
SUMATERA	8,77	10,19	11,78	13,48	15,74	6,07	6,34	6,64	6,95	7,25

Sumber: BPS Provinsi Riau

Urutan kedua setelah Kepulauan Riau kemudian pada posisi ketiga sampai kelima adalah Bangka Belitung, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Posisi Riau yang berada di urutan kedua sebagai akibat meningkatnya aktivitas ekonomi di Riau sedangkan jumlah pertumbuhan penduduk masih tergolong kecil, Namun begitu akibat pesatnya perkembangan perekonomian di Riau maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah migrasi, karena Riau dipandang sebagai wilayah tujuan alternatif untuk meningkatkan derajat ekonomi mereka. Dengan semakin banyaknya investor yang menanamkan investasinya di Riau,

diharapkan akan mendongkrak lebih tinggi lagi kemakmuran masyarakat Riau secara nyata.

Namun dilihat secara riil melalui angka PDRB per kapita Riau harga konstan di tahun 2008 mencapai sebesar 8,21 juta rupiah, yang menempatkan posisi Riau berada pada urutan ketiga sama seperti tahun sebelumnya setelah Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Bahkan angka PDRB per kapita Riau tersebut lebih tinggi dari rata-rata se-Sumatera yang hanya mencapai 7,25 juta. Hal ini menandakan daya beli masyarakat Riau masih lebih baik dari rata-rata se-Sumatera pada periode tersebut.



Lampiran

Tabel-tabel Pokok

**TABEL 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI RIAU ATAS DASAR
HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2004-2008
(Juta Rupiah)**

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007*)	2008**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	23.656.421.85	30.171.587.33	36.294.175.88	43.595.169.01	53.137.563.80
a. Tanaman Bahan Makanan	2.076.352.45	2.178.669.17	2.258.486.66	2.437.302.65	2.797.048.05
b. Tanaman Perkebunan	11.096.205.43	14.941.137.11	18.483.893.11	22.257.311.01	26.879.914.74
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	766.777.62	874.541.29	1.013.481.96	1.198.936.50	1.642.452.16
d. Kehutanan	7.358.992.41	9.397.580.56	11.279.160.84	13.899.720.42	17.185.486.64
e. Perikanan	2.358.093.94	2.779.659.20	3.259.153.31	3.801.898.43	4.632.662.20
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	47.475.704.94	57.927.709.65	70.427.525.42	91.119.826.29	123.781.863.82
a. Minyak dan Gas Bumi	47.011.122.97	57.259.547.78	69.178.832.03	89.103.779.09	120.771.330.59
b. Pertambangan tanpa Migas	153.239.15	310.353.96	800.053.40	1.410.745.53	2.072.244.81
c. Penggalian	311.342.82	357.807.91	448.639.99	605.301.67	938.288.43
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	23.793.107.99	27.881.009.28	32.313.284.03	39.156.003.58	50.179.230.71
a. Industri Migas	2.707.375.49	2.694.076.91	3.073.755.38	3.863.797.55	6.503.557.17
b. Industri Tanpa Migas	21.085.732.50	25.186.932.37	29.239.528.65	35.292.206.03	43.675.673.53
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	264.640.00	303.326.53	339.751.00	392.735.09	461.086.39
a. Listrik	208.009.42	240.118.31	268.468.09	314.804.19	371.703.55
b. Air Bersih	56.630.58	63.208.22	71.282.91	77.930.90	89.382.84
5. BANGUNAN	3.150.746.99	3.467.556.82	4.258.801.15	7.043.077.64	11.308.251.44
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	7.403.066.08	9.124.858.24	11.179.723.48	14.064.410.65	19.317.092.67
a. Perdagangan Besar dan Eceran	6.892.454.42	8.460.376.62	10.356.023.74	13.089.032.72	18.047.848.10
b. Hotel	291.624.54	395.866.58	496.733.66	586.083.53	775.688.89
c. Restoran	218.987.12	268.615.04	326.966.08	389.294.41	493.555.68
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	2.296.934.94	2.694.577.78	3.216.185.09	3.853.213.88	4.867.262.36
a. Pengangkutan	2.017.961.61	2.355.338.42	2.802.239.28	3.356.896.30	4.261.882.92
1. Angkutan Darat	1.301.309.33	1.500.003.12	1.787.306.98	2.152.635.90	2.772.726.35
2. Angkutan Laut	356.692.83	423.922.08	507.491.93	608.772.19	757.773.67
3. Angkutan Udara	92.237.74	114.816.17	146.886.01	189.128.55	247.246.84
4. Jasa Penunjang Angkutan	267.721.71	316.597.05	360.554.35	406.359.65	484.136.06
b. Komunikasi	278.973.33	339.239.36	413.945.81	496.317.58	605.379.44
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	1.982.730.36	2.569.166.68	3.134.172.22	3.924.150.41	5.068.118.69
a. Bank	977.482.44	1.376.415.36	1.673.887.00	2.068.992.84	2.565.037.80
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	145.472.35	173.857.74	214.959.17	257.051.89	312.664.78
c. Sewa Bangunan	782.232.08	926.771.48	1.132.732.85	1.448.121.54	1.960.509.08
d. Jasa Perusahaan	77.543.49	92.122.10	112.593.20	149.984.14	229.907.04
9. JASA - JASA	4.223.020.53	4.879.203.84	5.904.570.60	6.853.973.75	8.279.660.08
a. Pemerintahan Umum	3.254.327.58	3.754.327.58	4.522.838.44	5.111.541.73	6.097.615.26
b. Swasta	968.692.95	1.124.876.26	1.381.732.16	1.742.432.02	2.182.044.82
1. Sosial Kemasyarakatan	74.360.21	88.229.17	104.914.20	128.756.79	181.824.27
2. Hiburan dan rekreasi	121.593.50	140.267.83	170.247.92	226.044.25	310.564.20
3. Perorangan dan Rumahtangga	772.739.23	896.379.26	1.106.570.04	1.387.630.98	1.689.656.34
PDRB TERMASUK MIGAS	114.246.373.66	139.018.996.15	167.068.188.88	210.002.560.30	276.400.129.95
PDRB TANPA MIGAS	64.527.875.21	79.065.371.46	94.815.601.47	117.034.983.66	149.125.242.19

Keterangan: *) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

**TABEL 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI RIAU ATAS DASAR
HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2004-2008
(Juta Rupiah)**

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007*)	2008**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	12.464.887.42	13.308.660.62	14.103.047.84	14.785.911.40	15.494.292.46
a. Tanaman Bahan Makanan	1.649.395.17	1.689.455.26	1.724.881.20	1.768.512.67	1.809.453.28
b. Tanaman Perkebunan	4.369.777.82	4.792.832.66	5.252.099.26	5.622.057.76	6.071.166.19
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	609.783.03	653.525.97	699.643.99	751.979.61	813.625.48
d. Kehutanan	4.679.814.25	4.920.276.33	5.074.529.74	5.186.666.49	5.231.586.91
e. Perikanan	1.156.117.15	1.252.570.40	1.351.893.65	1.456.694.87	1.568.460.61
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	42.334.556.31	43.906.875.82	45.183.667.56	45.125.692.40	46.897.464.66
a. Minyak dan Gas Bumi	42.018.023.58	43.504.120.23	44.665.680.24	44.480.426.90	46.135.193.43
b. Pertambangan tanpa Migas	76.283.35	144.633.34	229.674.74	323.161.62	411.963.38
c. Penggalian	240.249.39	258.122.25	288.312.58	322.103.88	350.307.85
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	7.549.378.94	7.972.127.07	8.512.386.69	9.246.973.72	9.910.769.31
a. Industri Migas	2.318.927.93	2.266.924.86	2.287.553.88	2.312.072.47	2.353.257.90
b. Industri Tanpa Migas	5.230.451.01	5.705.202.21	6.224.832.81	6.934.901.25	7.557.511.42
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	151.556.65	165.499.00	175.200.34	185.050.79	197.745.09
a. Listrik	126.587.02	139.736.33	148.554.95	157.539.15	169.069.83
b. Air Bersih	24.969.63	25.762.67	26.645.39	27.511.65	28.675.26
5. BANGUNAN	2.064.977.55	2.212.679.83	2.395.732.42	2.674.930.31	2.972.880.21
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	5.121.976.81	5.641.815.35	6.278.665.89	6.840.260.85	7.504.882.30
a. Perdagangan Besar dan Eceran	4.951.976.08	5.453.810.45	6.071.558.29	6.613.065.87	7.254.200.20
b. Hotel	87.181.63	96.018.57	105.769.39	115.369.99	126.417.86
c. Restoran	82.819.10	91.986.33	101.338.21	111.824.99	124.264.24
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1.794.891.88	1.982.655.81	2.173.442.62	2.331.648.28	2.575.353.68
a. Pengangkutan	1.611.354.05	1.760.596.85	1.905.429.35	2.010.195.81	2.194.880.05
1. Angkutan Darat	1.092.605.76	1.195.699.12	1.299.202.68	1.352.923.62	1.468.888.44
2. Angkutan Laut	291.098.65	306.087.01	322.412.93	345.590.28	375.253.63
3. Angkutan Udara	103.744.15	121.170.51	133.777.15	147.439.15	169.285.57
4. Jasa Penunjang Angkutan	123.905.49	137.640.21	150.036.59	164.242.76	181.452.40
b. Komunikasi	183.537.83	222.058.96	268.013.27	321.452.47	380.473.63
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	653.130.59	771.841.96	892.826.69	1.011.841.54	1.149.980.23
a. Bank	129.654.68	194.169.46	264.562.28	320.483.32	391.264.51
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	55.915.85	60.660.12	65.534.34	72.074.44	79.180.92
c. Sewa Bangunan	419.382.89	464.101.85	505.464.68	554.668.27	608.389.88
d. Jasa Perusahaan	48.177.17	52.910.53	57.265.38	64.615.51	71.144.91
9. JASA - JASA	3.081.363.13	3.325.431.29	3.655.897.19	4.010.950.18	4.382.013.88
a. Pemerintahan Umum	2.378.271.92	2.545.684.84	2.800.377.59	3.063.274.58	3.345.185.05
b. Swasta	703.091.21	779.746.45	855.519.60	947.675.60	1.036.828.82
1. Sosial Kemasyarakatan	56.031.30	61.431.11	66.975.37	73.138.11	79.706.45
2. Hiburan dan rekreasi	79.257.43	86.943.57	97.207.27	107.512.53	117.990.81
3. Perorangan dan Rumahtangga	567.802.48	631.371.77	691.336.97	767.024.96	839.131.57
PDRB TERMASUK MIGAS	75.216.719.28	79.287.586.75	83.370.867.24	86.213.259.46	91.085.381.81
PDRB TANPA MIGAS	30.879.767.77	33.516.541.66	36.417.633.12	39.420.760.09	42.596.930.48

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROVINSI RIAU TERMASUK MIGAS
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2004-2008**

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007*)	2008**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	20.71	21.70	21.72	20.76	19.22
a. Tanaman Bahan Makanan	1.82	1.57	1.35	1.16	1.01
b. Tanaman Perkebunan	9.71	10.75	11.06	10.60	9.73
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	0.67	0.63	0.61	0.57	0.59
d. Kehutanan	6.44	6.76	6.75	6.62	6.22
e. Perikanan	2.06	2.00	1.95	1.81	1.68
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	41.56	41.67	42.15	43.39	44.78
a. Minyak dan Gas Bumi	41.15	41.19	41.41	42.43	43.69
b. Pertambangan tanpa Migas	0.13	0.22	0.48	0.67	0.75
c. Penggalian	0.27	0.26	0.27	0.29	0.34
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	20.83	20.06	19.34	18.65	18.15
a. Industri Migas	2.37	1.94	1.84	1.84	2.35
b. Industri Tanpa Migas	18.46	18.12	17.50	16.81	15.80
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	0.23	0.22	0.20	0.19	0.17
a. Listrik	0.18	0.17	0.16	0.15	0.13
b. Air Bersih	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03
5. BANGUNAN	2.76	2.49	2.55	3.35	4.09
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	6.48	6.56	6.69	6.70	6.99
a. Perdagangan Besar dan Eceran	6.03	6.09	6.20	6.23	6.53
b. Hotel	0.26	0.28	0.30	0.28	0.28
c. Restoran	0.19	0.19	0.20	0.19	0.18
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	2.01	1.94	1.93	1.83	1.76
a. Pengangkutan	1.77	1.69	1.68	1.60	1.54
1. Angkutan Darat	1.14	1.08	1.07	1.03	1.00
2. Angkutan Laut	0.31	0.30	0.30	0.29	0.27
3. Angkutan Udara	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09
4. Jasa Penunjang Angkutan	0.23	0.23	0.22	0.19	0.18
b. Komunikasi	0.24	0.24	0.25	0.24	0.22
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERIHAL	1.74	1.85	1.88	1.87	1.83
a. Bank	0.86	0.99	1.00	0.99	0.93
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11
c. Sewa Bangunan	0.68	0.67	0.68	0.69	0.71
d. Jasa Perusahaan	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08
9. JASA - JASA	3.70	3.51	3.53	3.26	3.00
a. Pemerintahan Umum	2.85	2.70	2.71	2.43	2.21
b. Swasta	0.85	0.81	0.83	0.83	0.79
1. Sosial Kemasyarakatan	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07
2. Hiburan dan rekreasi	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11
3. Perorangan dan Rumahtangga	0.68	0.64	0.66	0.66	0.61
PDRB TERMASUK MIGAS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 4. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROVINSI RIAU TERMASUK MIGAS
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2004-2008**

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007*)	2008**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	16.57	16.79	16.92	17.15	17.01
a. Tanaman Bahan Makanan	2.19	2.13	2.07	2.05	1.99
b. Tanaman Perkebunan	5.81	6.04	6.30	6.52	6.67
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	0.81	0.82	0.84	0.87	0.89
d. Kehutanan	6.22	6.21	6.09	6.02	5.74
e. Perikanan	1.54	1.58	1.62	1.69	1.72
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	56.28	55.38	54.20	52.34	51.49
a. Minyak dan Gas Bumi	55.86	54.87	53.57	51.59	50.65
b. Pertambangan tanpa Migas	0.10	0.18	0.28	0.37	0.45
c. Penggalian	0.32	0.33	0.35	0.37	0.38
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	10.04	10.05	10.21	10.73	10.88
a. Industri Migas	3.08	2.86	2.74	2.68	2.58
b. Industri Tanpa Migas	6.95	7.20	7.47	8.04	8.30
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22
a. Listrik	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19
b. Air Bersih	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5. BANGUNAN	2.75	2.79	2.87	3.10	3.26
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	6.81	7.12	7.53	7.93	8.24
a. Perdagangan Besar dan Eceran	6.58	6.88	7.28	7.67	7.96
b. Hotel	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14
c. Restoran	0.11	0.12	0.12	0.13	0.14
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	2.39	2.50	2.61	2.70	2.83
a. Pengangkutan	2.14	2.22	2.29	2.33	2.41
1. Angkutan Darat	1.45	1.51	1.56	1.57	1.61
2. Angkutan Laut	0.39	0.39	0.39	0.40	0.41
3. Angkutan Udara	0.14	0.15	0.16	0.17	0.19
4. Jasa Penunjang Angkutan	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20
b. Komunikasi	0.24	0.28	0.32	0.37	0.42
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	0.87	0.97	1.07	1.17	1.26
a. Bank	0.17	0.24	0.32	0.37	0.43
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09
c. Sewa Bangunan	0.56	0.59	0.61	0.64	0.67
d. Jasa Perusahaan	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08
9. JASA - JASA	4.10	4.19	4.39	4.65	4.81
a. Pemerintahan Umum	3.16	3.21	3.36	3.55	3.67
b. Swasta	0.93	0.98	1.03	1.10	1.14
1. Sosial Kemasyarakatan	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09
2. Hiburan dan rekreasi	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13
3. Perorangan dan Rumahtangga	0.75	0.80	0.83	0.89	0.92
PDRB TERMASUK MIGAS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Keterangan: *) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

**TABEL 5. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROVINSI RIAU TANPA MIGAS
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2004-2008**

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007*)	2008**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	36.66	38.16	38.28	37.25	35.63
a. Tanaman Bahan Makanan	3.22	2.76	2.38	2.08	1.88
b. Tanaman Perkebunan	17.20	18.90	19.49	19.02	18.03
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1.19	1.11	1.07	1.02	1.10
d. Kehutanan	11.40	11.89	11.90	11.88	11.52
e. Perikanan	3.65	3.52	3.44	3.25	3.11
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0.72	0.85	1.32	1.72	2.02
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	0.24	0.39	0.84	1.21	1.39
c. Penggalian	0.48	0.45	0.47	0.52	0.63
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	32.68	31.86	30.84	30.16	29.29
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	32.68	31.86	30.84	30.16	29.29
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	0.41	0.38	0.36	0.34	0.31
a. Listrik	0.32	0.30	0.28	0.27	0.25
b. Air Bersih	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06
5. BANGUNAN	4.88	4.39	4.49	6.02	7.58
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	11.47	11.54	11.79	12.02	12.95
a. Perdagangan Besar dan Eceran	10.68	10.70	10.92	11.18	12.10
b. Hotel	0.45	0.50	0.52	0.50	0.52
c. Restoran	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	3.56	3.41	3.39	3.29	3.26
a. Pengangkutan	3.13	2.98	2.96	2.87	2.86
1. Angkutan Darat	2.02	1.90	1.89	1.84	1.86
2. Angkutan Laut	0.55	0.54	0.54	0.52	0.51
3. Angkutan Udara	0.14	0.15	0.15	0.16	0.17
4. Jasa Penunjang Angkutan	0.41	0.40	0.38	0.35	0.32
b. Komunikasi	0.43	0.43	0.44	0.42	0.41
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	3.07	3.25	3.31	3.35	3.40
a. Bank	1.51	1.74	1.77	1.77	1.72
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0.23	0.22	0.23	0.22	0.21
c. Sewa Bangunan	1.21	1.17	1.19	1.24	1.31
d. Jasa Perusahaan	0.12	0.12	0.12	0.13	0.15
9. JASA - JASA	6.54	6.17	6.23	5.86	5.55
a. Pemerintahan Umum	5.04	4.75	4.77	4.37	4.09
b. Swasta	1.50	1.42	1.46	1.49	1.46
1. Sosial Kemasyarakatan	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12
2. Hiburan dan rekreasi	0.19	0.18	0.18	0.19	0.21
3. Perorangan dan Rumahtangga	1.20	1.13	1.17	1.19	1.13
PDRB TANPA MIGAS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 6. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROVINSI RIAU TANPA MIGAS
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2004-2008**

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007*)	2008**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	40.37	39.71	38.73	37.51	36.37
a. Tanaman Bahan Makanan	5.34	5.04	4.74	4.49	4.25
b. Tanaman Perkebunan	14.15	14.30	14.42	14.26	14.25
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1.97	1.95	1.92	1.91	1.91
d. Kehutanan	15.15	14.68	13.93	13.16	12.28
e. Perikanan	3.74	3.74	3.71	3.70	3.68
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1.03	1.20	1.42	1.64	1.79
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	0.25	0.43	0.63	0.82	0.97
c. Penggalian	0.78	0.77	0.79	0.82	0.82
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	16.94	17.02	17.09	17.59	17.74
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	16.94	17.02	17.09	17.59	17.74
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	0.49	0.49	0.48	0.47	0.46
a. Listrik	0.41	0.42	0.41	0.40	0.40
b. Air Bersih	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07
5. BANGUNAN	6.69	6.60	6.58	6.79	6.98
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	16.59	16.83	17.24	17.35	17.62
a. Perdagangan Besar dan Eceran	16.04	16.27	16.67	16.78	17.03
b. Hotel	0.28	0.29	0.29	0.29	0.30
c. Restoran	0.27	0.27	0.28	0.28	0.29
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	5.81	5.92	5.97	5.91	6.05
a. Pengangkutan	5.22	5.25	5.23	5.10	5.15
1. Angkutan Darat	3.54	3.57	3.57	3.43	3.45
2. Angkutan Laut	0.94	0.91	0.89	0.88	0.88
3. Angkutan Udara	0.34	0.36	0.37	0.37	0.40
4. Jasa Penunjang Angkutan	0.40	0.41	0.41	0.42	0.43
b. Komunikasi	0.59	0.66	0.74	0.82	0.89
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERIHAL	2.12	2.30	2.45	2.57	2.70
a. Bank	0.42	0.58	0.73	0.81	0.92
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19
c. Sewa Bangunan	1.36	1.38	1.39	1.41	1.43
d. Jasa Perusahaan	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17
9. JASA - JASA	9.98	9.92	10.04	10.17	10.29
a. Pemerintahan Umum	7.70	7.60	7.69	7.77	7.85
b. Swasta	2.28	2.33	2.35	2.40	2.43
1. Sosial Kemasyarakatan	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19
2. Hiburan dan rekreasi	0.26	0.26	0.27	0.27	0.28
3. Perorangan dan Rumah tangga	1.84	1.88	1.90	1.95	1.97
PDRB TANPA MIGAS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Keterangan: *) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

**TABEL 7. INDEKS PERKEMBANGAN PDRB PROVINSI RIAU ATAS DASAR
HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2004-2008**

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007*)	2008**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	242.92	309.82	372.69	447.67	545.65
a. Tanaman Bahan Makanan	142.72	149.76	155.24	167.53	192.26
b. Tanaman Perkebunan	330.51	445.04	550.56	662.95	800.64
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	152.63	174.08	201.73	238.65	326.93
d. Kehutanan	207.24	264.64	317.63	391.43	483.96
e. Perikanan	270.17	318.47	373.41	435.59	530.77
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	106.11	129.48	157.42	203.67	276.67
a. Minyak dan Gas Bumi	105.46	128.45	155.18	199.88	270.92
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	193.34	222.19	278.59	375.88	582.65
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	386.76	453.21	525.26	636.49	815.67
a. Industri Migas	106.50	105.97	120.91	151.99	255.82
b. Industri Tanpa Migas	584.15	697.76	810.03	977.71	1.209.96
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	232.34	266.30	298.28	344.80	404.80
a. Listrik	224.31	258.93	289.50	339.47	400.83
b. Air Bersih	267.50	298.57	336.71	368.12	422.21
5. BANGUNAN	214.64	236.22	290.12	479.79	770.35
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	208.48	256.97	314.84	396.08	544.00
a. Perdagangan Besar dan Eceran	200.75	246.42	301.63	381.23	525.67
b. Hotel	480.81	652.68	818.98	966.30	1.278.91
c. Restoran	384.64	471.81	574.30	683.78	866.91
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	196.67	230.71	275.38	329.92	416.74
a. Pengangkutan	172.78	201.67	239.93	287.42	364.91
1. Angkutan Darat	179.30	206.68	246.26	296.60	382.04
2. Angkutan Laut	168.54	200.31	239.80	287.65	358.06
3. Angkutan Udara	180.87	225.14	288.02	370.86	484.82
4. Jasa Penunjang Angkutan	346.15	409.34	466.18	525.40	625.96
b. Komunikasi	273.01	331.98	405.09	485.70	592.43
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	516.85	669.71	817.00	1.022.92	1.321.13
a. Bank	3.284.14	4.624.48	5.623.92	6.951.40	8.618.01
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	358.65	428.63	529.96	633.74	770.85
c. Sewa Bangunan	278.85	330.37	403.79	516.22	698.87
d. Jasa Perusahaan	236.62	281.11	343.58	457.67	701.56
9. JASA - JASA	186.65	215.66	260.98	302.94	365.95
a. Pemerintahan Umum	185.03	213.46	257.15	290.62	346.69
b. Swasta	192.32	223.33	274.33	345.94	433.22
1. Sosial Kemasyarakatan	197.43	234.26	278.56	341.86	482.76
2. Hiburan dan rekreasi	200.72	231.55	281.04	373.15	512.67
3. Perorangan dan Rumahtangga	190.59	221.09	272.93	342.26	416.75
PDRB TERMASUK MIGAS	164.20	199.81	240.12	301.83	397.26
PDRB TANPA MIGAS	287.35	352.09	422.23	521.18	664.08

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

TABEL 8. INDEKS PERKEMBANGAN PDRB PROVINSI RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2004-2008

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007*)	2008**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	128.00	136.66	144.82	151.83	159.11
a. Tanaman Bahan Makanan	113.37	116.13	118.56	121.56	124.38
b. Tanaman Perkebunan	130.16	142.76	156.44	167.46	180.84
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	121.38	130.09	139.26	149.68	161.95
d. Kehutanan	131.79	138.56	142.90	146.06	147.33
e. Perikanan	132.46	143.51	154.89	166.90	179.70
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	94.62	98.14	100.99	100.86	104.82
a. Minyak dan Gas Bumi	94.26	97.59	100.19	99.78	103.49
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	149.19	160.29	179.03	200.02	217.53
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	122.72	129.59	138.37	150.31	161.10
a. Industri Migas	91.22	89.17	89.98	90.95	92.57
b. Industri Tanpa Migas	144.90	158.05	172.45	192.12	209.37
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	133.06	145.30	153.81	162.46	173.61
a. Listrik	136.51	150.69	160.20	169.88	182.32
b. Air Bersih	117.95	121.69	125.86	129.96	135.45
5. BANGUNAN	140.67	150.73	163.20	182.22	202.52
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	144.24	158.88	176.82	192.63	211.35
a. Perdagangan Besar dan Eceran	144.23	158.85	176.84	192.61	211.29
b. Hotel	143.74	158.31	174.39	190.21	208.43
c. Restoran	145.47	161.57	178.00	196.42	218.27
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	153.68	169.76	186.09	199.64	220.51
a. Pengangkutan	137.97	150.75	163.15	172.12	187.93
1. Angkutan Darat	150.54	164.75	179.01	186.41	202.39
2. Angkutan Laut	137.55	144.63	152.34	163.30	177.31
3. Angkutan Udara	203.43	237.60	262.32	289.11	331.95
4. Jasa Penunjang Angkutan	160.20	177.96	193.99	212.36	234.61
b. Komunikasi	179.61	217.31	262.28	314.58	372.34
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	170.25	201.20	232.74	263.76	299.77
a. Bank	435.61	652.37	888.88	1.076.76	1.314.57
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	137.86	149.55	161.57	177.69	195.21
c. Sewa Bangunan	149.50	165.44	180.19	197.72	216.88
d. Jasa Perusahaan	147.01	161.46	174.74	197.17	217.10
9. JASA - JASA	136.19	146.98	161.59	177.28	193.68
a. Pemerintahan Umum	135.22	144.74	159.22	174.17	190.19
b. Swasta	139.59	154.81	169.85	188.15	205.85
1. Sosial Kemasyarakatan	148.77	163.11	177.83	194.19	211.63
2. Hiburan dan rekreasi	130.84	143.52	160.47	177.48	194.78
3. Perorangan dan Rumahtangga	140.05	155.73	170.52	189.19	206.97
PDRB TERMASUK MIGAS	108.11	113.96	119.83	123.91	130.91
PDRB TANPA MIGAS	137.51	149.26	162.17	175.55	189.69

Keterangan: *) Angka Perbaikan
 **) Angka Sementara

**TABEL 9. INDEKS BERANTAI PDRB PROVINSI RIAU ATAS DASAR
HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2004-2008**

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007*)	2008**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	121.74	127.54	120.29	120.12	121.89
a. Tanaman Bahan Makanan	113.45	104.93	103.66	107.92	114.76
b. Tanaman Perkebunan	126.80	134.65	123.71	120.41	120.77
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	113.83	114.05	115.89	118.30	136.99
d. Kehutanan	117.82	127.70	120.02	123.23	123.64
e. Perikanan	122.17	117.88	117.25	116.65	121.85
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	108.93	122.02	121.58	129.38	135.85
a. Minyak dan Gas Bumi	108.65	121.80	120.82	128.80	135.54
b. Pertambangan tanpa Migas	340.48	202.53	257.79	176.33	146.89
c. Penggalian	115.32	114.92	125.39	134.92	155.01
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	127.43	117.18	115.90	121.18	128.15
a. Industri Migas	122.73	99.51	114.09	125.70	168.32
b. Industri Tanpa Migas	128.06	119.45	116.09	120.70	123.75
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	112.22	114.62	112.01	115.59	117.40
a. Listrik	109.43	115.44	111.81	117.26	118.07
b. Air Bersih	123.84	111.61	112.77	109.33	114.69
5. BANGUNAN	113.68	110.06	122.82	165.38	160.56
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	128.01	123.26	122.52	125.80	137.35
a. Perdagangan Besar dan Eceran	125.11	122.75	122.41	126.39	137.89
b. Hotel	211.52	135.75	125.48	117.99	132.35
c. Restoran	161.03	122.66	121.72	119.06	126.78
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	120.01	117.31	119.36	119.81	126.32
a. Pengangkutan	119.19	116.72	118.97	119.79	126.96
1. Angkutan Darat	115.44	115.27	119.15	120.44	128.81
2. Angkutan Laut	112.11	118.85	119.71	119.96	124.48
3. Angkutan Udara	111.35	124.48	127.93	128.76	130.73
4. Jasa Penunjang Angkutan	162.54	118.26	113.88	112.70	119.14
b. Komunikasi	126.30	121.60	122.02	119.90	121.97
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	145.26	129.58	121.99	125.21	129.15
a. Bank	170.44	140.81	121.61	123.60	123.98
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	135.98	119.51	123.64	119.58	121.63
c. Sewa Bangunan	125.92	118.48	122.22	127.84	135.38
d. Jasa Perusahaan	122.55	118.80	122.22	133.21	153.29
9. JASA - JASA	120.03	115.54	121.02	116.08	120.80
a. Pemerintahan Umum	120.39	115.36	120.47	113.02	119.29
b. Swasta	118.84	116.12	122.83	126.10	125.23
1. Sosial Kemasyarakatan	123.22	118.65	118.91	122.73	141.22
2. Hiburan dan rekreasi	122.70	115.36	121.37	132.77	137.39
3. Perorangan dan Rumahtangga	117.85	116.00	123.45	125.40	121.77
PDRB TERMASUK MIGAS	117.45	121.68	120.18	125.70	131.62
PDRB TANPA MIGAS	124.57	122.53	119.92	123.43	127.42

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 10. INDEKS BERANTAI PDRB PROVINSI RIAU ATAS DASAR
HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, 2004-2008**

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007*)	2008**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	107.00	106.77	105.97	104.84	104.79
a. Tanaman Bahan Makanan	103.44	102.43	102.10	102.53	102.31
b. Tanaman Perkebunan	107.25	109.68	109.58	107.04	107.99
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	105.05	107.17	107.06	107.48	108.20
d. Kehutanan	108.26	105.14	103.14	102.21	100.87
e. Perikanan	107.33	108.34	107.93	107.75	107.67
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	98.81	103.71	102.91	99.87	103.93
a. Minyak dan Gas Bumi	98.62	103.54	102.67	99.59	103.72
b. Pertambangan tanpa Migas	351.18	189.60	158.80	140.70	127.48
c. Penggalian	112.07	107.44	111.70	111.72	108.76
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	109.53	105.60	106.78	108.63	107.18
a. Industri Migas	108.20	97.76	100.91	101.07	101.78
b. Industri Tanpa Migas	110.14	109.08	109.11	111.41	108.98
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	110.44	109.20	105.86	105.62	106.86
a. Listrik	111.65	110.39	106.31	106.05	107.32
b. Air Bersih	104.72	103.18	103.43	103.25	104.23
5. BANGUNAN	109.10	107.15	108.27	111.65	111.14
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	109.37	110.15	111.29	108.94	109.72
a. Perdagangan Besar dan Eceran	109.38	110.13	111.33	108.92	109.69
b. Hotel	109.37	110.14	110.16	109.08	109.58
c. Restoran	109.05	111.07	110.17	110.35	111.12
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	111.85	110.46	109.62	107.28	110.45
a. Pengangkutan	111.04	109.26	108.23	105.50	109.19
1. Angkutan Darat	109.20	109.44	108.66	104.13	108.57
2. Angkutan Laut	110.56	105.15	105.33	107.19	108.58
3. Angkutan Udara	126.13	116.80	110.40	110.21	114.82
4. Jasa Penunjang Angkutan	117.94	111.08	109.01	109.47	110.48
b. Komunikasi	119.50	120.99	120.69	119.94	118.36
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	118.92	118.18	115.67	113.33	113.65
a. Bank	152.78	149.76	136.25	121.14	122.09
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	108.66	108.48	108.04	109.98	109.86
c. Sewa Bangunan	113.38	110.66	108.91	109.73	109.69
d. Jasa Perusahaan	111.93	109.82	108.23	112.84	110.11
9. JASA - JASA	109.06	107.92	109.94	109.71	109.25
a. Pemerintahan Umum	108.86	107.04	110.00	109.39	109.20
b. Swasta	109.76	110.90	109.72	110.77	109.41
1. Sosial Kemasyarakatan	113.62	109.64	109.03	109.20	108.98
2. Hiburan dan rekreasi	107.52	109.70	111.81	110.60	109.75
3. Perorangan dan Rumahtangga	109.71	111.20	109.50	110.95	109.40
PDRB TERMASUK MIGAS	102.93	105.41	105.15	103.41	105.65
PDRB TANPA MIGAS	109.01	108.54	108.66	108.25	108.06

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 11. INDEKS IMPLISIT PDRB PROVINSI RIAU
MENURUT LAPANGAN USAHA, 2004-2008**

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007*)	2008**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN	189.78	226.71	257.35	294.84	342.95
a. Tanaman Bahan Makanan	125.89	128.96	130.94	137.82	154.58
b. Tanaman Perkebunan	253.93	311.74	351.93	395.89	442.75
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	125.75	133.82	144.86	159.44	201.87
d. Kehutanan	157.25	191.00	222.27	267.99	328.49
e. Perikanan	203.97	221.92	241.08	260.99	295.36
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	112.14	131.93	155.87	201.92	263.94
a. Minyak dan Gas Bumi	111.88	131.62	154.88	200.32	261.78
b. Pertambangan tanpa Migas	200.88	214.58	348.34	436.54	503.02
c. Penggalian	129.59	138.62	155.61	187.92	267.85
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	315.17	349.73	379.60	423.45	506.31
a. Industri Migas	116.75	118.84	134.37	167.11	276.36
b. Industri Tanpa Migas	403.13	441.47	469.72	508.91	577.91
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	174.61	183.28	193.92	212.23	233.17
a. Listrik	164.32	171.84	180.72	199.83	219.85
b. Air Bersih	226.80	245.35	267.52	283.27	311.71
5. BANGUNAN	152.58	156.71	177.77	263.30	380.38
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	144.54	161.74	178.06	205.61	257.39
a. Perdagangan Besar dan Eceran	139.19	155.13	170.57	197.93	248.79
b. Hotel	334.50	412.28	469.64	508.00	613.59
c. Restoran	264.42	292.02	322.65	348.13	397.18
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	127.97	135.91	147.98	165.26	188.99
a. Pengangkutan	125.23	133.78	147.07	166.99	194.17
1. Angkutan Darat	119.10	125.45	137.57	159.11	188.76
2. Angkutan Laut	122.53	138.50	157.40	176.15	201.94
3. Angkutan Udara	88.91	94.76	109.80	128.28	146.05
4. Jasa Penunjang Angkutan	216.07	230.02	240.31	247.41	266.81
b. Komunikasi	152.00	152.77	154.45	154.40	159.11
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	303.57	332.86	351.04	387.82	440.71
a. Bank	753.91	708.87	632.70	645.59	655.58
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	260.16	286.61	328.01	356.65	394.87
c. Sewa Bangunan	186.52	199.69	224.10	261.08	322.25
d. Jasa Perusahaan	160.95	174.11	196.62	232.12	323.15
9. JASA - JASA	137.05	146.72	161.51	170.88	188.95
a. Pemerintahan Umum	136.84	147.48	161.51	166.87	182.28
b. Swasta	137.78	144.26	161.51	183.86	210.45
1. Sosial Kemasyarakatan	132.71	143.62	156.65	176.05	228.12
2. Hiburan dan rekreasi	153.42	161.33	175.14	210.25	263.21
3. Perorangan dan Rumahtangga	136.09	141.97	160.06	180.91	201.36
PDRB TERMASUK MIGAS	151.89	175.34	200.39	243.58	303.45
PDRB TANPA MIGAS	208.96	235.90	260.36	296.89	350.08

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

**TABEL 12. PENDAPATAN REGIONAL TERMASUK MIGAS DAN ANGKA PER KAPITA
PROVINSI RIAU ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2004-2008**

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007*)	2008**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	114.246.373.66	139.018.996.15	167.068.188.88	210.002.560.30	276.400.129.95
2. Penyusutan Barang-barang Modal (Jutaan Rupiah)	7.117.549.08	8.660.883.46	10.408.348.17	13.083.159.51	17.219.728.10
3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	107.128.824.58	130.358.112.69	156.659.840.71	196.919.400.79	259.180.401.86
4. Pajak Tak Langsung Netto (Jutaan Rupiah)	2.684.789.78	3.266.946.41	3.926.102.44	4.935.060.17	6.495.403.05
5. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor (Jutaan Rupiah)	104.444.034.80	127.091.166.28	152.733.738.27	191.984.340.62	252.684.998.80
6. Penduduk Pertengahan Tahun	4.519.606	4.579.219	4.762.653	5.070.952	5.189.154
7. Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (Rupiah)	25.277.949.82	30.358.669.49	35.078.807.73	41.412.847.19	53.264.969.58
8. Per Kapita Pendapatan Regional (Rupiah)	23.109.101.72	27.753.895.65	32.069.046.03	37.859.624.90	48.694.835.19

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

<http://riau.bps.go.id>

**TABEL 13. PENDAPATAN REGIONAL TERMASUK MIGAS DAN ANGKA PER KAPITA
PROVINSI RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000, 2004-2008**

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007*)	2008**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	75.216.719.28	79.287.586.75	83.370.867.24	86.213.259.46	91.085.381.81
2. Penyusutan Barang-barang Modal (Jutaan Rupiah)	4.686.001.61	4.939.616.65	5.194.005.03	5.371.086.06	5.674.619.29
3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	70.530.717.67	74.347.970.10	78.176.862.21	80.842.173.40	85.410.762.52
4. Pajak Tak Langsung Netto (Jutaan Rupiah)	1.767.592.90	1.863.258.29	1.959.215.38	2.026.011.60	2.140.506.47
5. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor (Jutaan Rupiah)	68.763.124.76	72.484.711.81	76.217.646.83	78.816.161.80	83.270.256.05
6. Penduduk Pertengahan Tahun	4.519.606	4.579.219	4.762.653	5.070.952	5.189.154
7. Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (Rupiah)	16.642.317.78	17.314.652.73	17.505.131.54	17.001.395.29	17.553.031.15
8. Per Kapita Pendapatan Regional (Rupiah)	15.214.406.91	15.829.055.52	16.003.191.25	15.542.675.58	16.046.981.08

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

<http://riau.bps.go.id>

**TABEL 14. PENDAPATAN REGIONAL TANPA MIGAS DAN ANGKA PER KAPITA
PROVINSI RIAU ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2004-2008**

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007*)	2008**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	64.527.875.21	79.065.371.46	94.815.601.47	117.034.983.66	149.125.242.19
2. Penyusutan Barang-barang Modal (Jutaan Rupiah)	4.020.086.63	4.925.772.64	5.907.011.97	7.291.279.48	9.290.502.59
3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	60.507.788.58	74.139.598.82	88.908.589.50	109.743.704.18	139.834.739.61
4. Pajak Tak Langsung Netto (Jutaan Rupiah)	1.516.405.07	1.858.036.23	2.228.166.63	2.750.322.12	3.504.443.19
5. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor (Jutaan Rupiah)	58.991.383.52	72.281.562.59	86.680.422.86	106.993.382.06	136.330.296.41
6. Penduduk Pertengahan Tahun	4.519.606	4.579.219	4.762.653	5.070.952	5.189.154
7. Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (Rupiah)	14.277.323.11	17.266.125.83	19.908.148.14	23.079.489.54	28.737.871.76
8. Per Kapita Pendapatan Regional (Rupiah)	13.052.328.79	15.784.692.23	18.200.029.03	21.099.269.34	26.272.162.36

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

<http://riau.bps.go.id>

**TABEL 15. PENDAPATAN REGIONAL TANPA MIGAS DAN ANGKA PER KAPITA
PROVINSI RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000, 2004-2008**

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007*)	2008**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	30.879.767.77	33.516.541.66	36.417.633.12	39.420.760.09	42.596.930.48
2. Penyusutan Barang-barang Modal (Jutaan Rupiah)	1.923.809.53	2.088.080.55	2.268.818.54	2.455.913.35	2.653.788.77
3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rupiah)	28.955.958.23	31.428.461.12	34.148.814.58	36.964.846.74	39.943.141.71
4. Pajak Tak Langsung Netto (Jutaan Rupiah)	725.674.54	787.638.73	855.814.38	926.387.86	1.001.027.87
5. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor (Jutaan Rupiah)	28.230.283.69	30.640.822.39	33.293.000.20	36.038.458.88	38.942.113.84
6. Penduduk Pertengahan Tahun	4.519.606	4.579.219	4.762.653	5.070.952	5.189.154
7. Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (Rupiah)	6.832.402.60	7.319.270.31	7.646.501.46	7.773.838.15	8.208.839.14
8. Per Kapita Pendapatan Regional (Rupiah)	6.246.182.45	6.691.276.92	6.990.431.63	7.106.842.83	7.504.520.75

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

<http://riau.bps.go.id>